Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KOMUNIKASI POLITIK dan PEMBANGUNAN NASIONAL

Edisi Revisi



TRUSSMEDIA GRAFIKA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Edisi Revisi

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Edisi Revisi

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.

TRUSSMEDIA GRAFIKA

Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi Politik dan Pembangunan Nasional

Penulis:
Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D.

Editor/ Penyunting:
Minan Nuri Rohman

Penyelaras Akhir:
M. Aqibun Najih

Cover & Layout:
st. Navisah

Penerbit:
Trussmedia Grafika
Jl. Gunungan, Karang, RT.03, No.18
Singosaren, Banguntapan, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Phone. 08 222 923 86 89/ WA: 0857 291 888 25
Email: one_trussmedia@yahoo.com

Edisi Revisi, Januari 2018
x + 142 ; 14 x 21 cm
ISBN: 978-602-0992-50-1

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya penulis dilimpahkan nikmat sehat sehingga dapat beraktivitas tanpa kurang suatu apapun.

Buku berjudul: "*Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi Politik dan Pembangunan Nasional''* terinspirasi dan diadaptasi dari Kertas Karya Perorangan (Taskap) karya penulis usai mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVII di Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) RI tahun 2012.

Pada kesempatan yang bahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Gubernur Lemhanas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA di Lemhanas tahun 2012. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap, yaitu **Bapak Mayjen TNI (Purn) Semion Remon, S.IP.Si.,M.Sc** dan Tim penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan Taskap hingga terselesaikannya tugas tersebut sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhanas RI.

Penulis menyadari, tentu ada kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan buku ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon adanya kritik konstruktif atau masukan guna perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan di kemudian hari.

Besar harapan penulis supaya buku ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis, khususnya kepada Lemhanas RI, termasuk bagi siapa saja yang *concern* dalam rangka membahas aktualisasi nilai-nilai kepemimpinan dan peran pemimpin bangsa kita ini dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera lahir dan batin berdasarkan pancasila.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan dan petunjuk serta bimbingan kepda kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Jakarta, 05 Januari 2018

Penulis

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.

DAFTAR ISI

YAYASAN SYECH WALID THAIB SALEH INDRAGIRI

اهل السنة والجماعة

مؤسسه شيخ والد طيب صالح اندر الكيري

TEMBILAHAN - INHIL - RIAU

BAB I

Pendahuluan

A. Pendahuluan

Secara filosofis, keberadaan pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat melalui berbagai aktivitasnya. Penyelenggaraan pemerintahan menyangkut penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehari-hari (*day to day administrator*) secara luas, pemberian pelayanan kepada masyarakat luas (*public services*) serta pembangunan berbagai infrastruktur maupuan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengatasi persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat, setidaknya memberikan fasilitasi secara maksimal sehingga masyarakat mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya[1]. Manajemen atau pengelolaan pemerintahan pada saat ini sedang berada pada masa transisi. Beberapa penanda yang dapat diamati adalah adanya pergeseran

[1] Zuryawan Isvandiar Zoebir, 2008, *Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah*, http://budiutomo79.blogspot.com/2007/09/pembangunan-wilayah-perbatasan.html, di akses tanggal 10 Juni 2012, Pukul 21.00 Wib

paradigma pengelolaan pemerintahan dari yang berbasis pada kekuasaan ke arah manajemen publik yang berdasarkan pada akuntabilitas (*accountability*) dan pemenuhan kepuasan penggunan layanan (*customer satisfaction*). Peran pemerintah sebagai penyelenggara seluruh kegiatan (*acting or executing*) berubah menuju ke peran sebagai pengarah (*regulating*) dalam rangka pemberdayaan (*empowering*) masyarakat. Selain itu, pengelolaan pemerintahan yang berstruktur dan berbudaya tertutup bergeser menuju ke arah pengelolaan yang tebuka (*transparancy*).[2] Bahkan dewasa ini proses partisipasi publik merupakan tolok ukur bagi pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan. Bahkan, Issu partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik tersebut juga telah menjadi issu global hal tersebut ditandai dengan munculnya issu *Good Governance* dalam mengelola kebijakan sebuah negara. ***M.M Billah*** menyatakan *good governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu didalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan saat ini. Pengabaian terhadap faktor ini, terbukti telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemborosan keuangan negara merupakan implikasi lain deviasi tersebut. Proses pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi proyek-proyek pembangunan di tingkat kabupaten/kota, terbukti telah berhasil

[2] *Ibid.*

membawa perubahan-perubahan mendasar dalam peningkatan kesejahteraan keluarga-keluarga pedesaan.[3]

Lebih lanjut Gunawan Sumodiningrat[4] mengemukakan bahwa pemihakan dan pemberdayaan masyarakat dalam keseluruhan rangkaian penyusunan program-program pembangunan, perlu diyakini oleh aparatur pemerintah sebagai strategi yang tepat untuk menggalang kemampuan ekonomi nasional, sehingga mampu berperan secara nyata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, keyakinan itu juga perlu terus ditanamkan dalam diri aparatur yang secara fungsional menangani proses-proses penyusunanan program pada kabupaten/kota untuk selanjutnya ditingkatkan serta dimasyarakatkan, Upaya-upaya ke arah tersebut tidak secara serta merta dapat terwujud, melainkan harus melalui proses berliku-liku yang akan menghabiskan banyak waktu serta tenaga, dan tampaknya harus dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas dan hati nurani yang jernih, karena dalam pelaksanaannya dalam masyarakat akan banyak mempergunakan mekanisme komunikasi timbal balik, mendengar dan menampung dengan penuh kesabaran, dan sikap toleransi dalam menghadapi pandangan yang berbeda (*community approach*).[5]

Permasalahan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat tidak bisa dituduhkan hanya pada bagaimana pelibatan

---

[3] Clark, John, 1995 "*The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector.*" *World Development* 23, No. 4. Lihat juga Friedmann, John, 1992, *Empowerment—The Politics Alternative Development*, Cambridge: Blackwell Publishers

[4] Sumodiningrat, Gunawan, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta.

[5] Ginandjar Kartasasmita, 1997, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Makalah ini diangkat dari bahan kuliah pada Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung (ITB), yaitu mata kuliah *Pembangunan yang Bertumpu Pada Masyarakat* (SP 607), www.ginanjar.com, diakses tanggal 10 Juni 2012, Pukul 21.00 Wib.

partisipasi masyarakat semata, hal yang terpenting adalah ***pertama,*** pemerintah mampu menyusun dan merencanakan seperti apa konsep pengembangan dan model pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan komunikasi politik yang akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional, ***kedua,*** pemerintah mampu merencanakan dan menganalisis seperti apa dan mengapa lingkungan strategis yang di hadapi berpengaruh terhadap upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, ***ketiga,*** seperti apa seyogyanya konsep pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional. Sehingga melalui konsep pemberdayaan tersebut pemerintah membangun strategi untuk mulai meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan, kebijakan pembangunan ini menganut dua filosofi dasar yaitu *public touch and bringing the public in*, yakni sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh menyentuh kebutuhan publik dan juga mampu membawa masyarakat masuk kedalam ruang-ruang kebijakan atau yang dikenal dengan sebutan pembangunan partisipatif.

Pembangunan partispatif merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan pembangunan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi

sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efesien, dan berkelanjutan.

Dari latar belakang di atas maka dalam kertas karya perorangan ini akan dikaji dan dibahas terkait dengan *"Pemberdayaan Masyarakat Guna Meningkatkan Komunikasi Politik dalam Rangka Pembangunan Nasional*

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penulisan kertas karya perorangan ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana:

1) Konsep pengembangan dan model pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan komunikasi politik yang akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional.
2) Perencanaan dan menganalisis pengaruh lingkungan strategis terhadap upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.
3) Seyogyanya kebijakan konsep pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional.

b. Tujuan

Tujuan dari penulisan kertas karya perorangan ini adalah untuk mengetahui :

1) Konsep pengembangan dan model pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan komunikasi politik yang akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional.
2) Perencanaan dan menganalisis pengaruh lingkungan strategis terhadap upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.
3) Kebijaksanaan konsep pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional.

C. Ruang Lingkup dan Sistematika

Lingkup pembahasan dalam kertas karya perorangan ini dibatasi pada permasalahan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional, disusun dengan tata urut sebagai berikut :

a) Bab I. Pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, metode pendekatan, ruang lingkup dan tata urut, serta beberapa pengertian.
b) Bab II. Landasan Pemikiran, menguraikan secara umum pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional, paradigma nasional, peraturan perundang-undangan terkait, landasan teori, dan tinjauan pustaka.
c) Bab III. Kondisi saat ini, menguraikan secara umum keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan

nasional saat ini, urgensi pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan komunikasi politik, pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional, problematika pemberdayaan masyarakat.

d) Bab IV. Perkembangan lingkungan strategis. Bab ini memberikan gambaran pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang bersifat global, regional, nasional dan peluang serta kendala terhadap pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional.

e) Bab V. Kondisi yang diharapkan, menguraikan secara umum pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan komunikasi politik, melalui implementasi pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional, kontribusi pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional, serta indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional.

f) Bab VI. Konsepsi atau pemecahan masalah, menguraikan kebijakan, strategi dan upaya yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional.

g) Bab VII. Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

D. Metode Pendekatan

a) **Metode**. Metode yang digunakan penulisan TASKAP ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menekankan pada pengumpulan dengan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder dan ditambah dengan data primer (pernyataan, wawancara, cerita, pengakuan).

b) **Pendekatan**. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan TASKAP ini menggunakan persfektif ketahanan nasional dengan analisis multi disiplin ilmu (interdispliner).

E. Pengertian

Penulis akan memberikan pembatasan pengertian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman terhadap judul yang penulis kaji yaitu :

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas *(independent)* dan mandiri[6]. Dari pengertian tersebut menurut hemat penulis bahwa pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya adalah upaya yang secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk memampukan, melibatkan, dan memberikan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan

---

[6] Sumaryo Gitosaputro, 1995, *Implementasi Participatory Rural Appraisal (PRA),* Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, *Volume 2, Nomor 1, Juni 2006,* Lihat juga pendapat R.Chambers dalam bukunya yang berjudul *Rural Development : Putting The Last First*. London; New York: Longman.

bagi kepentingan peningkatan kesejahteraannya. Sedangkan dari dimensi politik pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan publik/masyarakat, artinya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang sangat penting bagi upaya pembangunan nasional, dimana dalam setiap pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dukungan penuh dan konkrit dari semua pihak dalam upaya untuk memampukan, melibatkan dan memberikan rasa tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam setiap agenda pembangunan nasional.[7]

Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosialnya.

Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga- lembaga politik.[8] Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etik, partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin agar pemerintah selalu tanggap terhadap masyarakat atau perilaku demokratisnya. Dan itu juga berarti bahwa metode yang digunakan dalam pembangunan nasional harus sesuai dengan kondisi fisiologis

---

[7] Jhon Friedman, 1992, *Empowerment The Politics of Alternative Development.* Blackwell Publishers, Cambridge, USA.

[8] Astrid S. Susanto, 1989, *Komunikasi Sosial di Indonesia*, Jakarta, Hal. 9. Lihat juga alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat dari pembangunan nasional.

sosial dan ekonomi serta lingkungan kebudayaan masyarakat Indonesia.

Pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi[9]. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan dengan senantiasa harus mewujudkan wawasan nusantara serta memperkokoh ketahanan nasional yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraannya Negara yang maju dan demokratis berdasarkan pancasila. Pembangunan nasional di arahkan untuk rasa tenteram, dan rasa keadilan serta terjamin kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan tuhannya, antara sesama manusia dengan lingkungannya alam sekitarnya.[10][]

---

[9] Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia Ke 4.

[10] Dani Umar, *Makna Pembangunan Nasional*, Http//www.blogspot.20, diakses tanggal 20 Mei 2012, Pukul 21.00 Wib.

BAB II

Landasan Pemikiran

A. Pendahuluan

Perubahan masyarakat yang sangat cepat oleh arus globalisasi mengakibatkan beberapa implikasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perubahan yang sangat cepat didukung oleh meningkatnya arus globalisasi pada gilirannya akan mengakibatkan beberapa perubahan[1]. Pertama, perekonomian akan semakin terbuka dengan meningkatnya arus globalisasi, kedua, pergeseran pengendalian dan penguasaan modal dari pemerintah ke swasta akan semakin meningkat, ketiga, peranan pemerintah maupun pemerintah daerah di masa depan akan semakin besar dengan makin kuatnya gerakan desentralisasi.

Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi

[1] Tirta Hidayat, *"Model-model Perencanaan Pembangunan Nasional Masa Depan*", dalam Prisma Nomor Khusus 25 Tahun Prisma 1971-1996.

muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan. Meskipun demikian, pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh *stakeholders* pembangunan, baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat. Bahkan di kalangan masyarakat sendiri masih gamang menghadapi praktek partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan di lingkungannya. Di sisi lain, hampir semua proyek dan program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanya, dimana masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan program pembangunan. Akan tetapi, dalam prakteknya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.[2]

B. Paradigma Nasional

1) Pancasila sebagai Landasan Idiil

Pancasila sebagai landasan idiil yang menjadi perumusan cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang diyakini kebenarannya. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila yang digali dari budaya luhur bangsa Indonesia mendorong tumbuhnya

---

[2] Agus Purbathin Hadi, *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan,* Http//www.google.*suniscome.50webs.com/.* diakses tanggal 22 Mei 2012 Pukul 21.00 WIB.

rasa dan paham kebangsaan yang mengerucut menjadi semangat kebangsaan, berkomitmen untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut harus dijadikan landasan *dalam pengambilan setiap keputusan politik* dan peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika ditelaah sila per sila yang terdapat dalam Pancasila, upaya mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional terdapat dalam sila ke kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan betapa seluruh upaya pembangunan, untuk mengembangkan perekonomian Indonesia, diarahkan pada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan (*distributive justice*) bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2) *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional*

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, merupakan hukum dasar tertulis yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara *dan juga dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik per undang-undangan*. UUD 1945 merupakan keputusan politik nasional yang dituangkan dalam norma-norma konstitusi. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia merupakan amanat konstitusi (UUD 1945), yang menegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan di atas adalah melalui kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut meliputi semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan sosial budaya serta pertahanan-keamanan.

3) Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia, yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 serta memperhatikan sejarah dan budaya tentang diri dan lingkungan keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi, dengan menciptakan tanggungjawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah pada penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan Nasionalnya.[3]

Sebagai landasan visional, wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mempunyai fungsi untuk membangkitkan tekad dan semangat, serta menjamin persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekaan dan kesatuan wilayah yang berdasarkan Pancasila. Dengan demikian wawasan nusantara merupakan pengamalan eksistensi masyarakat Indonesia baik sebagai sebagai suatu bangsa dan negara dan digunakan sebagai pedoman oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan aman.

---

[3] Pokja Lemhannas RI. 2007. *BS Geopolitik dan Wasantara: Modul 2 Konsepsi Wawasan Nusantara*. Jakarta: Lemhannas RI. Hal 13.

d). Ketahanan Nasional Sebagai Landasan Konsepsional

Ketahanan nasional adalah sebuah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional[4]

Implementasi Konsepsi Tannas dalam Pembangunan Nasional, merupakan suatu tuntutan sejarah yang sangat diperlukan dalam menyatukan misi pencapaian Tujuan Nasional. Pada dasarnya implementasi Konsepsi Tannas identik dengan pandangan Geostrategi Indonesia dalam melaksanakan pembangunan Nasional, yang selama ini dilaksanakan Pemerintah Negara. Suatu pandangan dalam mengarahkan seluruh sumber daya nasional sebagai modal dasar dalam menggalikan situasi dan kondisi kehidupan nasional yang terintegrasi yang harus diwujudkan (Tannas), mengendalikan ruang hidup (Darat, Laut, dan Udara), serta mengendalikan waktu tahapan pembangunan (Jangka Panjang, Jangka Sedang dan Jangka Pendek).

C. Peraturan Perundang-Undangan Terkait

1) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

[4] Pokja Lemhannas RI. 2007. *BS Geostrategi dan Tannas: Modul 3 Konsepsi dan Tolok Ukur Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI. Hal 15

Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya dimaksud dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Definisi ini mereperesentasikan kesadaran pemerintah bahwa pembangunan bersifat lintas bidang, sehingga harus dijalankan dengan memberdayakan semua potensi bangsa.

Pembangunan seringkali diartikan secara sempit, sehingga kehilangan perspektif yang utuh dan menyeluruh. Misalnya, pembangunan hanya digambarkan dari capaian pertumbuhan ekonomi atau pembangunan yang dimaknai dari industrialisasi semata berupa pergeseran dari produksi bahan primer, terutama pertanian, menuju produksi barang jadi. Pemahaman ini tidak tepat, karena pembangunan adalah suatu proses yang holistik dengan melibatkan hubungan kausal di antara aspek ekonomi dan non-ekonomi dalam perspektif jangka panjang.

Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan tersebut diatas telah dinyatakan didalam Bab II Pasal 4 Huruf d yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk mengoptimalkan partipasi masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut telah menjamin bahwa dalam setiap langkah perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah partisipasi masyarakat wajib untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah.

2) UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional hal ini terlihat dalam ketentuan umum penjelasan undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP yang mengatakan salah satu tujuan yang dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut adalah menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.[5]

3) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian Kedelapan "Hak turut serta dalam Pemerintahan

Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional hal ini terlihat dalam ketentuan umum dan Pasal 14 yang mengatakan "bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya".

4) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi landasan Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Undang-undang ini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara

[5] Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Tahun 2005 – 2025.

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, khususnya terhadap agenda pembangunan nasional dengan tetap mentaati rambu-rambu hukum yang berlaku.

5) UU. No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum

Undang-Undang ini menjadi landasan bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat terhadap segala aspek pembangunan nasional hal ini terlihat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 undang-undang ini yang menyatakan bahwa untuk "mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

D. Landasan Teori

1) `Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan secara partisipatif kiranya sangat sesuai

dan dapat dipakai untuk mengantisipasi timbulnya perubahan-perubahan dalam masyarakat beserta lingkungan strategisnya. Sebagai konsep dasar pembangunan partisipatif adalah melakukan upaya pembangunan atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat mampu untuk berkembang dan mengatasi permasalahannya sendiri secara mandiri, berkesinambungan dan berkelanjutan. Menurut Kumar[6] bahwa keberdayaan adalah kondisi dinamik yang merefleksikan kemampuan suatu sistem sosial dalam mewujudkan tujuan atau nilai-nilai yang diacunya (diidamkannya)[7]. Sehubungan dengan itu maka pemberdayaan berarti usaha (program, proses) untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuan secara mandiri. Sebagai suatu kondisi, keberdayaan adalah kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkaya secara efektif dan efisien dalam koridor norma-norma (etik, sosial, politik, hukum, agama) yang menjadi acuannya. Budaya non fisik manusia yang menjadi kekuatan manusia untuk keberdayaan sistem sosial itu adalah "Panca Gatra Sistem Sosial", yaitu :

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Organisasi dan Tata Laksana
3. Prasarana dan Sumberdaya Administratsi
4. Jaringan Kelembagaan
5. Kepemimpinan.

---

6 Kumar S, 2002, *Methods for Commmunity Participation*, ITDP Publishing, London. Hal. 21.

7 *Ibid.*

Dari sudut pandang analisis kesisteman, maka keberadaan (eksistensi) suatu sitem sosial disamping ditentukan oleh kekuatan *internal* (Panca Gatra Sis Sos) di atas, juga ditentukan oleh lingkungan (*eksternal*). Atau kehidupan sesuatu sistem sosial secara mikro hanya akan berlangsung lancar apabila sistem makro mendukungnya. Dari sudut pandang mikro, pertanian adalah sektor atau upaya (ekonomi) masyarakat untuk menghasilkan barang/jasa dengan atau dari pemanfaatan proses biologik biota (tanaman, ternak, ikan) tertentu yang bisa dibudidayakannya dengan menguntungkan (bernilai tambah). Dalam tinjauan makro, keberdayaan masyarakat untuk menghasilkan barang / jasa guna memenuhi kebutuhan atau permintaan masyarakat/ pasar itu adalah refleksi dari kemampuan pengelolaan aparatur sistem makro (pemerintah) untuk memiliki, menguasahi dan mempergunakan Panca Gatra Sistem Sosial tersebut.

Dari sudut pandang paradigma keberdayaan (Panca Gatra), dapat dirumuskan bahwa belum terbentuknya keberdayaan masyarakat karena belum adanya program pembelajaran mengenai gatra administrasi dan kelembagaan yang menjadi instrumen dan modus dari manifestasi kemandirian. Artinya tanpa sistem administrasi dan kelembagaan, kemandirian dan bonafiditas serta posisi tawar masyarakat tidak akan berkembang. Sebab tanpa kedua subsistem tersebut, sebuah sistem sosial akan terjebak dalam sindroma *otoritarian, chaos* dan *anarki*.

2) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Nasional

1) Konsep Partisipasi

Telah lama menjadi bahan kajian, dimulai dari latar belakang sejarahnya, konotasi teoritisnya, dan penerapan praktisnya. Di

Indonesia, meskipun selama pembangunan era orde baru dinilai kurang melibatkan masyarakat, namun batasan partisipasi juga berkembang, sehingga muncul berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangannya. Kata "partisipasi" dan "*partisipatoris*" merupakan dua kata yang sangat sering digunakan dalam pembangunan. Keduanya memiliki banyak makna yang berbeda. Berbagai kajian, dokumen proyek, dan buku panduan menunjukkan tafsiran yang sangat beragam mengenai arti kata partisipasi. Berikut ini beberapa tafsiran makna partisipasi[8]:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah membuat peka pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosialnya.
5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.

---

[8] Mikkelsen, 2001, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan.* Yayasan Obor Indonesia, Hal. 89.

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Para peneliti pembangunan yang lebih berpengalaman akan mengetahui bahwa partisipasi telah sedemikian luas penggunaannya, sehingga menjadikan makna partisipasi menjadi agak kabur. Penggunaan istilah partisipasi tersebut terkait dua alternatif pilihan, ***pertama*** partisipasi sebagai tujuan pada dirinya sendiri, ***kedua,*** sebagai alat untuk mengembangkan diri. Sebenarnya kedua interpretasi tersebut merupakan satu kesatuan, keduanya mewakili partisipasi yang bersifat transformasional dan instrumental dalam suatu program (proyek) tertentu, serta dapat kelihatan dalam kombinasi yang berbeda. Partisipasi instrumental terjadi ketika partisipasi dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai sasaran tertentu, partisipasi masyarakat setempat dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh orang luar. Pratisipasi transformasional terjadi ketika partisipasi itu pada dirinya sendiri dipandang sebagai tujuan, dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, misalnya masyarakat menjadi lebih berswadaya dan dapat berkelanjutan.[9]

Sebagai suatu tujuan, partisipasi akan menghasilkan pemberdayaan, yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dengan demikian partisipasi merupakan alat dalam memajukan ideologi atau tujuan-tujuan pembangunan yang normatif, seperti keadilan sosial, persamaan hak, dan demokrasi. Oleh karena itu sebagai alternatifnya, partisipasi ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen proyek, atau sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Sebagai implikasinya,

[9] Sumaryo Gitosaputro, *Op., Cit,*Hal. 20.

partisipasi menyangkut pula strategi manajemen, yang dapat digunakan oleh negara dalam mencoba untuk memobilisasi sumber daya-sumber daya yang dimilikinya.[10]

Ada beberapa hambatan yang hadapi di lapangan ketika melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif antara lain adalah :

a) Belum dipahaminya makna sebenarnya dari konsep partisipasi oleh perencana dan pelaksana pembangunan. Definisi yang berlaku di kalangan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Di lapangan, para perencana dan pelaksana pembangunan menggunakan konsep hierarkhis dalam menyeleksi proyek pembangunan. Proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah diistilahkan sebagai proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat, sedangkan proyek yang diusulkan oleh rakyat dianggap sebagai suatu keinginan. Karena merupakan kebutuhan, maka proyek harus dilaksanakan, sedangkan proyek yang diusulkan oleh rakyat merupakan keinginan, maka menjadi prioritas berikutnya.[11]

b) `Reaksi balik yang datang dari masyarakat sebagai akibat dari diperlakukannya pembangunan sebagai ideologi baru di Indonesia. Sebagai suatu ideologi, maka pembangunan harus diamankan dan dijaga ketat. Pengamanan yang ketat terhadap pembangunan menimbulkan reaksi balik dari masyarakat yang merugikan usaha membangkitkan

---

[10] *Ibid*

[11] Soetrisno L, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta, Hal. 77.

kemauan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Reaksi balik tersebut misalnya: muncul budaya diam sebagai manifestasi keengganan masyarakat untuk mengevaluasi proses pembangunan secara kritis dan terbuka; di kalangan aparat muncul budaya mencari selamat, karena mereka takut kehilangan jabatan bila proyeknya dianggap gagal. Budaya ini menimbulkan sikap aparat yang arogan yang menilai masyarakatnya yang kritis sebagai kelompok yang "vokal", kelompok wts (waton suloyo), dan sebagainya.[12] dilihat dari aspek perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi dua. ***Pertama***, perencanaan sebagai upaya mekanis untuk mengubah keadaan masyarakat. Perencanaan dianggap sebagai *blue print* (cetak biru) perubahan tersebut yang dapat menciptakan pola-pola perubahan yang dirancang oleh perencana. Model ini sering dikenal sebagai *mechanistic planning model* atau *social engineering model*. Model perencanaan ini sering yang melahirkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bagi pelaksana proyek pembangunan. Kadangkala juklak dan juknis tersebut tidak sesuai untuk wilayah tertentu. Dengan demikian masyarakat dianggap sebagai bagian pasif (subsistem) dari sistem pembangunan. ***Kedua***, perencanaan sebagai usaha mensistematisasi aspirasi pembangunan yang ada dalam masyarakat dan menyusunnya kedalam dokumen tertulis. Model ini melihat masyarakat sebagai sistem sosial yang penuh dengan nilai-nilai sosial budaya yang dinamis. Model ini sering disebut sebagai *human action planning model*.

[12] *Ibid.*

Model perencanaan yang pertama sangat menonjolkan pada ketatnya pelaksanaan juklak dan juknis berimplikasi pada kesan yang bersifat anti-demokrasi, sebab pelaksana pembangunan nasional selalu berpegang pada rencana yang telah ditetapkan oleh penyusunnya. Demikian halnya pada model perencanaan yang kedua, meskipun model tersebut mengarah pada perencanaan yang bersifat *buttom up*. Namun, dalam pelaksanaannya para perencana tidak atau belum meguasai bagaimana cara mengakomodasi keinginan atau aspirasi masyarakat, umumnya para perencana berupaya bagaimana memanipulasi aspirasi tersebut. Akibatnya perencanaan pembangunan nasional yang disusunnya juga bersifat anti demokrasi.

2). Metode pendekatan dan tolak ukur pemberdayaan masyarakat

Community Development dengan segala kegiatannya dalam pembangunan sebaiknya menghindari metode kerja "*doing for the community*", tetapi mengadopsi metode kerja "*doing with the community*". Metode kerja *doing for*, akan menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung pada bantuan pemerintah atau organisasi-organisasi sukarela pemberi bantuan. Sebaliknya, metode kerja *doing with*, merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya - *real needs, felt needs* dan *expected need* . Metode kerja *doing with*, sangat sesuai dengan gagasan besar KI Hajar Dewantara tentang kepemimpinan pendidikan di Indonesia - *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani* - yang

berfokus akan perlunya kemandirian yang partisipatif di dalam proses pembangunan[13].

Berdasarkan berbagai pejelasan di atas, maka berbagai metode yang digunakan dalam proses perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat adalah sebagai berikut :

a) Participatory Rural Appraisal (PRA)

Anonim[14], pendekatan, metode dan teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*) berkembang pada periode 1990-an. *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah sebuah metode pemahaman lokasi dengan cara belajar dari, untuk dan bersama dengan masyarakat untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui multi-disiplin dan keahlian untuk menyusun informasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan. PRA mempunyai sejumlah teknik untuk mengumpulkan dan membahas data. Teknik ini berguna untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Teknik-teknik PRA antara lain[15] :

1) *Secondary Data Review* (SDR) – Review Data Sekunder. Merupakan cara mengumpulkan sumber-sumber informasi yang telah diterbitkan maupun yang belum disebarkan. Tujuan dari usaha ini adalah untuk mengetahui

---

[13] Tampobulon, M. 2006. *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan. Sumatera Utara.

[14] Anonim. 2002. *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Website. Perkumpulan Masyarakat Penanggulangan Bencana. http://pmpbencana.org. Di akses, 27 Juli 2012.

[15] Mohamad Ikbal Bahua, Metode Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Masyarakat, Http//www.google.com, diakses tanggal 27 Juli 2012.

data manakah yang telah ada sehingga tidak perlu lagi dikumpulkan.

2) *Direct Observation* – Observasi Langsung. Direct Observation adalah kegiatan observasi langsung pada obyek-obyek tertentu, kejadian, proses, hubungan-hubungan masyarakat dan mencatatnya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk melakukan cross-check terhadap jawaban-jawaban masyarakat.

3) *Semi-Structured Interviewing* (SSI) – Wawancara Semi Terstruktur. Teknik ini adalah wawancara yang mempergunakan panduan pertanyaan sistematis yang hanya merupakan panduan terbuka dan masih mungkin untuk berkembang selama interview dilaksanakan. SSI dapat dilakukan bersama individu yang dianggap mewakili informasi, misalnya wanita, pria, anak-anak, pemuda, petani, pejabat lokal.

4) *Focus Group Discussion* – Diskusi Kelompok Terfokus. Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal bersifat khusus secara mendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu dengan lebih rinci.

5) *Preference Ranking and Scoring.* Adalah teknik untuk menentukan secara tepat problem-problem utama dan pilihan-pilihan masyarakat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memahami prioritas-prioritas kehidupan masyarakat sehingga mudah untuk diperbandingkan.

6) *Direct Matrix Ranking*. Adalah sebuah bentuk ranking yang mengidentifikasi daftar criteria obyek tertentu.

Tujuannya untuk memahami alasan terhadap pilihan-pilihan masyarakat, misalnya mengapa mereka lebih suka menanam pohon rambutan dibandingkan dengan pohon yang lain. Kriteria ini mungkin berbeda dari satu orang dengan orang lain, misalnya menurut wanita dan pria tentang tanaman sayur.

7) Peringkat Kesejahteraan. Rangking Kesejahteraan Masyarakat di suatu tempat tertentu. Tujuannya untuk memperoleh gambaran profil kondisi sosio-ekonomis dengan cara menggali persepsi perbedaan-perbedaan kesejahteraan antara satu keluarga dan keluarga yang lainnya dan ketidak seimbangan di masyarakat, menemukan indicator-indikator lokal mengenai kesejahteraan.
8) Pemetaan Sosial. Teknik ini adalah suatu cara untuk membuat gambaran kondisi sosial-ekonomi masyarakat, misalnya gambar posisi pemukiman, sumber-sumber mata pencaharian, peternakan, jalan, dan sarana-sarana umum. Hasil gambaran ini merupakan peta umum sebuah lokasi yang menggambarkan keadaan masyarakat maupun lingkungan fisik.
9) Transek (Penelusuran). Transek merupakan teknik penggalian informasi dan media pemahaman daerah melalui penelusuran dengan berjalan mengikuti garis yang membujur dari suatu sudut ke sudut lain di wilayah tertentu.
10) Kalender Musim. Adalah penelusuran kegiatan musiman tentang keadaan-keadaan dan permasalahan yang

berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu (musiman) di masyarakat. Tujuan teknik ini untuk memfasilitasi kegiatan penggalian informasi dalam memahami pola kehidupan masyarakat, kegiatan, masalah-masalah, fokus masyarakat terhadap suatu tema tertentu, mengkaji pola pemanfaatan waktu, sehingga diketahui kapan saat-saat sibuk dan saat-saat waktu luang.

11) Alur Sejarah. Alur sejarah adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui kejadian-kejadian dari suatu waktu sampai keadaan sekarang dengan persepsi orang setempat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai topik-topik penting di masyarakat.

12) Analisa Mata Pencaharian. Masyarakat akan terpandu untuk mendiskusikan kehidupan mereka dari aspek mata pencaharian. Tujuan dari teknik ini yaitu memfasilitasi pengenalan dan analisa terhadap jenis pekerjaan, pembagian kerja pria dan wanita, potensi dan kesempatan, hambatan.

13) Diagram Venn. Teknik ini adalah untuk mengetahui hubungan institusional dengan masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh masing-masing institusi dalam kehidupan masyarakat serta untuk mengetahui harapan-harapan apa dari masyarakat terhadap institusi-institusi tersebut.

14) Kecenderungan dan Perubahan. Adalah teknik untuk mengungkapkan kecenderungan dan perubahan yang terjadi di masyarakat dan daerahnya dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk memahami perkembangan

bidang-bidang tertentu dan perubahan-perubahan apa yang terjadi di masyarakat dan daerahnya.

PRA yang dikembangkan oleh Robert Chambers[16] lebih ditujukan untuk ”orang luar”, bagaimana seharusnya ”orang luar”, yang membantu masyarakat untuk mengembangkan dirinya, mendudukkan posisinya ditengah-tengah masyarakat. ”Orang luar” ini bisa para pegawai pemerintah, anggota LSM, orang orang Perguruan Tinggi. PRA itu sendiri menurutnya adalah metode yang mendorong masyarakat pedesaan/pesisir untuk turut serta meningkatkan pengetahuan dan menganalisa kondisi mereka sendiri, wilayahnya sendiri yang berhubungan dengan hidup mereka sehari hari agar dapat membuat rencana dan tidakan yang harus dilakukan, dengan cara pendekatan berkumpul bersama[17].

Berikut ini ada sekurang kurangnya 11 prinsip metode PRA[18] yang aplikasinya akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat nelayan, yaitu:

1. Mengutamakan Yang Terabaikan

Prinsip ini memiliki makna keberpihakan terhadap masyarakat yang terabaikan, termarjinalisasikan, mungkin tertindas atau terlindas oleh struktur. Sekelompok masyarakat seperti ini tidak boleh diabaikan oleh sekelompok masyarakat yang lain. Dalam masyarakat

---

[16] R.Chambers, 1995, *Rural Development : Putting The Last First*, London; New York: Longman.

[17] Dikutip dari buku anonym “ Setelah Metode PRA, Lalu Apa?, penerbit Konsorsium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara, hal.1

[18] Sepuluh prinsip dalam metode PRA ini dikutip dari Acuhan Penerapan PRA yang dikutip dari Berbuat Bersama, Berperan Setara, Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara.

nelayan misalnya, bagaimanapun masyarakat nelayan memiliki tipologi seperti nelayan besar dan kecil atau ada majikan dan anak buah kapal. Dalam sebuah kelompok bagaimana menseimbangkan kedudukan antarmereka dalam sebuah kelompok sehingga mereka memiliki akses yang sama dalam hak. Golongan inilah yang paling memerlukan peningkatan dalam taraf hidup mereka sebab golongan ini biasanya adalah golongan masyarakat yang miskin secara ekonomi, meski mereka belum tentu miskin dalam pengalaman dan pengetahuan.

2. Penguatan Masyarakat

Penguatan masyarakat memiliki makna bahwa masyarakat memiliki kemampuan tidak hanya ekonomi akan tetapi juga sosial politik. Artinya, kekuatan ekonomi memungkinkan masyarakat tidak tergantung dengan orang luar, sedang kemampuan sosial politik memungkinkan masyarakat mampu membela haknya. Para kelompok nelayan harus kuat secara kelembagaan yang memberikan kekuatan secara ekonomi maupun politis. Selain itu mereka juga memiliki kemampuan untuk mengelola lingkungannya tanpa intervensi orang luar, bahkan mereka mampu mengadakan tawar menawar dengan orang luar. Dengan kemampuan ini mereka memiliki peluang, dan kontrol terhadap lingkungan serta mampu memberikan pertimbangan terhadap orang luar jika mereka mengarah pada proses perusakan lingkungan dari usaha mereka.

3. **Masyarakat sebagai pelaku, orang luar sebagai fasilitator**

Posisi orang luar hanya sebagai fasilitator artinya mereka mendorong proses perubahan secara partisipatif yang bersumber dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Ada kalanya seorang fasilitator juga menjadi mediator terhadap kejadian konflik yang berlangsung dalam masyarakat. Peran fasilitator sebagai motivator adalah untuk mendorong semangat masyarakat untuk bekerja sama karena ada pengakuan eksistensi dari orang luar. Masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan memiliki arti bahwa mulai dari mengidentifikasi masalah sampai dengan prencanaan kegiatan dan imlementasinya dilakukan oleh masyarakat. Ada kelemahan dari masyarakat pada umumnya yakni mereka tidak memiliki jaringan sosial yang luas, terutama jaringan kerjasama dengan kelompok lain yang lebih luas sebagai kesatuan komunitas. Kalau hal ini ada hanyalah dilakukan oleh individu individu tertentu yang bukan menjadi asetnya kelompok. Fasilitaor dapat mengambil peran ini yakni sebagai orang berusaha menghubunganhkan antarmasyarakat dengan orang luar yang diperlukan. Misalnya, ketika para nelayan terjebek oleh tengkulak sehingga terpaksa mereka menjual hasil tangkapan dengan harga rendah, maka fasilitator bisa menghubungkan dengan pedagang alternatif untuk mengangkat nasib mereka.

4. **Saling Berlajar dan Menghargai Perbedaan**

Prinsip ini lebih mengutamakan hubungan antar

orang luar yang berperan sebagai fasilitator dengan kelompok masyarakat yang difasilitasinya. Orang luar yang memfasilitasi kelompok nelayan perlu mengerti kebudayaan dan cara berfikir masyarakat setempat. Dengan cara ini seorang fasilitator atau orang luar berusaha belajar terhadap lingkungan setempat yang kemungkinan besar ada hal yang tidak terpikrkan oleh orang luar, akan tetapi hal itu muncul sebagai teknologi maupun pengetahuan lokal. Pada tingkat ini ada prinsip bahwa kelompok masyarakat belajar dengan orang luar dan sebaliknya. Kemampuan untuk memahami perbedaan ini lah menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh para fasilitator atau orang luar.

5. Santai dan informal

Kegiatan yang dilakukan baik orang luar bekerja sama dengan masyarakat setempat maupu antar masyarakat setempat adalah memerlukan situsi santai, tidak formal, luwes dan fleksibel. Situasi ini sangat umum berlangsung dalam kelompok nelayan, petani dan seterusnya. Beginilah pada umumnya suasana desa nelayan atau pedalaman itu berlangsung. Melalui suasana infrmal seperti ini semua persoalan dapat diungkapkan dengan baik meskipun sering kali juga ada perbedaan pandangan antaranggota masyarakat. Kedatangan orang luar sering disambut dengan sikap formal masyarakat yang seringkali menjadi kaku. Fasilitator harus mampu membuat suasana santai informal dan akrab dengan masyarakat.

6. Trianggulasi

Prinsip ini lebih berhubungan dengan perolehan informasi. Adakalanya informasi yang dikemukakan oleh individu ada kemungkinan tidak dibenarkan menurut kelompok. Ada kemungkinan juga informasi yang diberikan kelompok tidak cocok dengan realitas. Oleh sebab itu prinsip trianggulasi merupakan tidakan untuk mengontrol sumber informasi. Dalam masyarakat nelayan misalnya kalau juragan mengemukakan informasi maka tingkat subyektivitasnya juga tinggi mana kala berkenaan dengan kepentingan para juragan itu. Demikian juga dengan kelompok yang lain. Karena sumber informasi itu banyak maka kebenaran informasi itu perlu dicari melalui berbagai pihak dengan cara *cross check.*

7. Optimalisasi Hasil

Optimalisasi hasil sangat berkaitan dengan informsi yang dikumpulkannya. Karena banyaknya informasi yang dikumpulkan seringkali informasi itu sulit dianalisis. Oleh sebab itu dalam hal seperti ini para pemandu atau fasilitator perlu mengajak mereka untuk mengklasifikasikan secara bersama sama informasi yang telah diperolehnya. Ada baiknya bahwa informasi yang dikumpulkan adalah sangat erat kaitanya dengan masalah yang ingin dipecahkan secara bersama sama sehingga informasi yang dikumpulkan sangat optimal. Banyaknya informasi bukan berarti buruk akan tetapi banyaknya informasi jangan sampai mengganggu pencapaian tujuan.

8. **Orientasi praktis**

Artinya bahwa program program yang dikembangkan dengan metode PRA ini lebih berorientasi pada pemecahan masalah secara praktis. Misalnya saja apa yang menjadi masalah nelayan, potensi (kemampuan manusia atau kelompok untuk mengerakkan perubahan)apa yang dimiliki, tersedianya potensi pendukung lain atau tidak, yang kemungkinan berada pada kelompok lain atau daerah lain, ada tidaknya sumber yang dimiliki dst dan program program yang dirancang memecahkan kebutuhan banyak pihak atau tidak.

9. **Keberlanjutan**

Dalam kehidupan masyarakat masalah ekonomi itu berkembang terus, artinya selama manusia itu ada maka masalah tidak pernah akan selesai. Oleh karenannya program yang dirancang oleh masyarakat untuk memecahkan persoalan mereka adalah berkesinambungan dan memungkinkan mengantisipasi munculnya masalah dikemudian hari.

10. **Belajar dari kesalahan**

Dalam PRA kesalahan itu wajar dan sangat manusiawi, oleh sebab itu perencanaan program jangan terlalu sulit sehingga masyarakat tidak mampu memenuhinya. Dalam menyusun kegiatan bukan juga hal yang bersifat coba coba akan tetapi telah mempertimbangkan banyak hal termasuk tentang kesalahan.

11. Terbuka

Dalam PRA sangat memungkinkan ketidak sempurnaan oleh sebab itu keterbukaan atas tanggapan orang lain terhadap kegiatan PRA ini sangat positif sebab disdari bahwa disetiap metode tidak pernah ada yang berlangsung dengan sempurna.

PRA, sebagai metode yang banyak dipercaya oleh beberapa kalangan cukup tepat digunakan dalam usaha pemberdayaan masyarakat, adalah bukan suatu metode dan teknik yang benar-benar sudah fiks. Seandainya sebuah buku, dalam metode PRA masih banyak terdapat halaman-halaman kosong, dimana pembaca mempunyai dan bahkan diberi kesempatan untuk mengisi halaman kososng tersebut. Hal tersebut memungkinkan pengembangan yang tidak terbatas terhadap metode ini, dan itu bukan menjadi masalah selama prinsip dasar metode ini masih menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan teknik-teknik PRA. Pertimbangan tersebut perlu ditekankan agar kita tidak terjebak lagi dalam pola lama yang menjadikan suatu metode merupakan panduan atau petunjuk pelaksanaan teknis (juklaknis) yang baku, yang tidak mungkin ada perubahan, yang kalau tidak menggunakan dan mengikuti panduan tersebut artinya salah, dan lain-lain yang antara lain seperti telah diuraikan dalam permasalahan yang mungkin muncul dalam penerapan PRA.

b) Kaji Tindak Partisipatif (KTP)

Agusta[19] menyatakan bahwa Kaji Tindak Partisipatif (KTP)

[19] Agusta, I. 2005, *Aneka Metode Partisipasi Untuk Pembangunan Desa*. Blogspot http://iagusta.blogspot.com/. Sosiolog Pedesaan Institut Pertanian Bogor. Di akses, 27 Juli 2012.

adalah istilah program sedangkan esensinya menunjuk pada metodologi *Participatory Learning and Action* (PLA) atau belajar dari bertindak secara partisipatif; belajar dan bertindak bersama, aksi refleksi partisipatif. Penggunaan istilah PLA dimaksudkan untuk menekankan pengertian partisipatif pada proses belajar bersama masyarakat untuk pengembangan. Kaji Tindak Partisipatif, dan nama kegiatan mencerminkan suatu dialektika yang dinamis antara kajian dan tindakan secara tak terpisahkan. Kajian partisipatif menjadi dasar bagi tindakan partisipatif. Jika dari suatu tindakan terkaji masih ditemui hambatan dan masalah, maka kajian partisipatif diulang kembali untuk menemukan jalan keluar, demikian seterusnya. Sebuah kajian partisipatif dalam masyarakat meletakkan semua pihak yang berpartisipasi apakah sebagai petani, nelayan, pedagang, aparat desa, atau petugas pelayan masyarakat dalam posisi yang setara fungsional, dan menghindar dari adanya pihak yang memiliki posisi istimewa dalam menggali dan merumuskan proses dan hasil kajian.

c) Participatory Research and Development (PRD)

Penelitian mengenai partisipasi dan pembangunan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. PRD yang merupakan wujud nyata dari pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam bentuk (a) proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya, dan (b) melalui kampanye dan

aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab[20].

d) Metode Rapid Rural Appraisal (RRA)

Teknik RRA mulai berkembang pada akhir 1970-an dan diterima secara akademis pada akhir tahun 1980-an. Teknik RRA berkembang karena adanya ketidak puasan penggunaan kuisioner pada metode penelitian konvensional. Kuisioner seringkali menghasilkan suatu hasil yang tidak tuntas dan informasi yang diperoleh seringkali tidak meyakinkan. Selain itu, adanya bias dalam melihat kaum miskin, pada metode penelitian konvensional. Sebagai contoh, kuisioner hanya melihat masyarakat kelas atas, orang berpendidikan tinggi dan kurang menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Pendekatan dalam RRA hampir sama dengan PRA antara lain : *secondary data review, direct observation, semi-strucuted interview, workshop dan brainstorming, transect, mapping, ranking and scoring, developing chronologies of local events, dan case studies*[21].

Perbedaan yang menonjol dari kedua pendekatan ini adalah dari segi partisipasi masyarakat. Dalam RRA, informasi dikumpulkan oleh pihak luar (*outsiders*), kemudian data dibawa pergi, dianalisa dan peneliti tersebut membuat perencanaan tanpa menyertakan masyarakat. RRA lebih bersifat penggalian informasi, sedangkan PRA dilaksanakan bersama-sama masyarakat (*let them do it*), mulai dari pengumpulan informasi, analisa sampai pada perencanaan program.

---

[20] Suharto, E. 2002. *Metodologi Pengembangan Masyarakat.* Community work in New Zealand. http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_19.htmn. Di akses, 27 Juli 2012.

[21] Anonim, *Op.,Cit*

e) Metode Participatory Action Research (PAR)

Teoritisasi dalam PAR dimulai dengan pengungkapan-pengungkapan dan penguraian secara rasional dan kritis terhadap praktek-praktek sosial mereka. Dari kesemua prinsip-prinsip PAR yang ada, yang terpenting adalah dalam PAR tidak mengharuskan membuat dan mengelola catatan rekaman yang menjelaskan apa yang sedang terjadi se-akurat mungkin, akan tetapi merupakan analisa kritis terhadap situasi yang secara kelembagaan diciptakan (seperti melalui proyek-proyek, program-program tertentu atau sistem. Salah satu prinsip dalam PAR yang paling unique adalah menjadikan pengalaman-pengalaman mereka sendiri sebagai sasaran pengkajian (*objectifying their own experience*).

Mahmudi[22], ada beberapa prinsip-prinsip PAR yang yang harus dipahami terlebih dahulu. Antara lain, (1) PAR harus diletekkan sebagai suatu pendekatan untuk memperbaiki praktek-praktek sosial dengan cara merubahnya dan belajar dari akibat-akibat dari perubahan tersebut. (2), secara keseluruhan merupakan partisipasi yang murni (*autentik*) dimana akan membentuk sebuah spiral yang berkesinambungan sejak dari perencanaan (*planing*), tindakan (pelaksanaan atas rencana), observasi (evaluasi atas pelaksanaan rencana), refleksi (teoritisi pengalaman). (3), PAR merupakan kerjasama (kolaborasi), semua yang memiliki tanggungjawab atas tindakan perubahan dilibatkan dalam upaya-upaya meningkatkan kemampuan mereka. (4) PAR merupakan suatu proses membangun pemahaman yang sistematis (*systematic learning process*), merupakan proses penggunaan

---

[22] Mahmudi, A. 2004. *Metode Penelitian Kritis dan Prinsip-prinsip Participatory Action Research* (PAR). Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi Agama Islam Swara Ditpertais: No. 19 Th. II, 15 November 2004. http://www.ditpertais.net/swara. Di akses, 27 Juli 2012.

kecerdasan kritis saling mendiskusikan tindakan mereka dan mengembangkannya, sehingga tindakan sosial mereka akan dapat benar-benar berpengaruh terhadap perubahan sosial. (5), PAR suatu proses yang melibatkan semua orang dalam teoritisasi atas pengalaman-pengalaman mereka sendiri.

f) Metode PPKP (Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan)

Saharia[23], metode PPKP adalah salah satu metode perencanaan partisipatif yang bertujuan untuk menggali permasalahan yang ada di masyarakat, penyebab terjadinya masalah, dan cara mengatasinya dengan menggunakan sumberdaya lokal atas prinsip pemberdayaan masyarakat yang acuannya sebagai berikut :

1) Mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh petani sendiri. Bahan informasi ini dapat digunakan oleh orang lain atau suatu lembaga yang akan membantu petani.
2) Mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari dan oleh masyarakat desa untuk saling berbagi, berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta tidak lanjutnya.
3) Informasi yang diperoleh dengan Metode PPKP dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat desa (petani).
4) Metode PPKP ini dilaksanakan oleh pengambil kebijakan bersama petani, kelompok pendamping lapangan, dan

[23] Saharia. 2003. *Pemberdayaan Masayarakat Di Pedesaan Sebagai Salah Satu Upaya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Manusia Secara Optimal.* Makalah Individu Pengantar Falsafah Sains (PPS702). Sekolah Pascasarjana / S3 Institut Pertanian Bogor. E-mail: sahauntad@yahoo.com. Di akses, 27 Juli 2012.

dari unsur pemerintah desa. Dalam Metode PPKP ini kelompok pendamping lapangan hanya sebatas fasilitator.

g) Metode Participatory Learning Methods (PLM)

Thoyib[24], model pembelajaran partisipatif sebenarnya menekankan pada proses pembelajaran, di mana kegiatan belajar dalam pelatihan dibangun atas dasar partisipatif (keikutsertaan) peserta pelatihan dalam semua aspek kegiatan pelatihan, mulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, sampai pada tahap menilai kegiatan pembelajaran dalam pelatihan. Upaya yang dilakukan pelatih pada prinsipnya lebih ditekankan pada motivasi dan melibatkan kegiatan peserta.

Pada awal kegiatan pelatihan, intensitas peranan pelatih adalah tinggi. Peranan ini ditampilkan dalam membantu peserta dengan menyajikan informasi mengenai bahan ajar (bahan latihan) dan dengan melakukan motivasi dan bimbingan kepada peserta. Intensitas kegiatan pelatih (sumber) makin lama makin menurun, sehingga perannya lebih diarahkan untuk memantau dan memberikan umpan balik terhadap kegiatan pelatihan dan sebaliknya kegiatan peserta pada awal kegiatan rendah, kegiatan awal ini digunakan hanya untuk menerima bahan pelatihan, informasi, petunjuk, bahan-bahan, langkah-langkah kegiatan. Kemudian partisipasi warga makin lama makin meningkat tinggi dan aktif membangun suasana pelatihan yang lebih bermakna.

Beberapa teknik yang dapat dipergunakan pada model pelatihan ini adalah :

---

[24] Thoyib, M. 2007. *Model pembelajaran partisipatif.* Website. Departemen Sosial RI. http://www.mirror.depsos.go.id/. Di akses, 27 Juli 2012.

1) Teknik dalam tahap pembinaan keakraban : teknik diad, teknik pembentukan kelompok kecil, teknik pembinaan belajar berkelompok, teknik bujur sangkar terpecah.
2) Teknik yang dipergunakan pada tahap identifikasi : curah pendapat, dan wawancara.
3) Teknik dalam tahap perumusan tujuan : teknik Delphi dan diskusi kelompok (*round table discussion*).
4) Teknik pada tahap penyusunan program adalah : teknik pemilihan cepat (*Q-shot technique*) dan teknik perancangan program.
5) Teknik yang dapat dipergunakan dalam proses pelatihan: Simulasi, studi kasus, cerita pemula diskusi (*discussion starter story*), *Buzz grou*p, pemecahan masalah kritis, forum, role play, magang, kunjungan lapangan dan lain-lain.
6) Teknik yang dapat dipergunakan dalam penilaian proses pelatihan, hasil dan pengaruh kegiatan : respon terinci, cawan ikan (*fish bowl technique*), dan pengajuan pendapat tertulis.

h) Metodologi Participatory Assessment (MPA)

Dayal dan Nilanjana Mukherjee[25], *Methodology for Participatory Assessments* (MPA) adalah metode yang dikembangkan untuk menjalankan penilaian suatu proyek pembangunan masyarakat (*community development*). MPA merupakan alat yang berguna

[25] Dayal. R. Christine van Wijk, and Nilanjana Mukherjee. 2000, *Methodology for Participatory Assessments with Communities, Institutions and Policy Makers.* Website. http://www.waspola.org/default/policy/web. Di akses, 27 Juli 2012.

bagi pembuat kebijakan, manajer program dan masyarakat, sehingga masayarakat setempat dapat memantau kesinambungan pembangunan dan mengambil tindakan yang diperlukan agar menjadi semakin baik. Metodologi tersebut mengungkapkan bagaimana caranya kaum perempuan dan keluarga yang kurang mampu dapat ikut berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari pembangunan, bersama-sama dengan kaum lelaki dan keluarga dimana mereka berada. MPA merupakan pengembangan dari pendekatan-pendekatan partisipatif misalnya PRA yang merupakan perangkat peralatan dan metode yang selama bertahun-tahun telah terbukti efektif untuk membuat masyarakat berpartisipasi. MPA mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) MPA merupakan metode yang ditujukan baik kepada instansi pelaksana maupun kepada masyarakat untuk mencapai kondisi pengelolaan sarana yang berkesinambungan dan digunakan secara efektif. Dirancang sedemikian rupa untuk melibatkan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) utama dan menganalisis keberadaan masyarakat yang memiliki 4 komponen penting: lelaki miskin, perempuan miskin, lelaki kaya, perempuan kaya.
2) MPA menggunakan satu set indikator yang “sector specific” untuk mengukur kesinambungan, kebutuhan, gender dan kepekaan akan kemiskinan. Masing-masing diukur dengan menggunakan urutan alat partisipatifi pada masyarakat, instansi pelaksana dan pembuat kebijakan. Hasil dari penilaian pada tingkat masyarakat dibawa oleh wakil-wakil masyarakat pengguna dan instansi pelaksana

ke dalam rapat pihak berkepentingan (stakeholder), dengan tujuan untuk secara bersama mengevaluasi faktor-faktor kelembagaan yang berpengaruh pada dampak proyek dan kesinambungan pada tingkat lapangan. Hasil dari penilaian kelembagaan digunakan untuk melakukan peninjauan ulang atas kebijakan pada tingkat program atau tingkat nasional.

3) MPA menghasilkan sejumlah data kualitatif tingkat desa, sebagiannya dapat dikuantitatifkan kedalam sistem ordinal oleh para warga desa itu sendiri. Data kuantitatif ini dapat dianalisis secara statistik.

4) Dengan cara ini kita dapat mengadakan analisis antar masyarakat, antar proyek dan antar waktu, serta pada tingkat program. Dengan demikian MPA dapat digunakan untuk menghasilkan informasi manajemen untuk proyek skala besar dan data yang sesuai untuk analisis program.

Partisipasi masyarakat dalam manajemen pembangunan akan menghantarkan masyarakat untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, menganalisa akar-akar masalah tersebut, mendesain kegiatan-kegiatan terpilih, serta memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Proses penyusunan rencana pembangunan secara demokratis dan partisipatoris dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota, kemudian pada tingkat Provinsi. Hasil dari Musrenbang Provinsi kemudian dibawa ke Musrenbang Nasional yang merupakan sinkronisasi dari Program Kementerian dan Lembaga dan harmonisasi dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya yang menikmati haruslah yang menghasilkan.[26] Teori-teori ekonomi makro, yang umumnya bersandar pada peran pasar dalam alokasi sumber daya, serta dengan praanggapan bahwa kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat akan menguntungkan semua lapisan masyarakat, dalam kenyataannya tidak dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan bagi masalah kesenjangan. Kekuatan sosial yang tidak berimbang, menyebabkan kegagalan pasar untuk mewujudkan harapan itu[27]. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan yang harus dilakukan dengan kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada lapisan masyarakat terbawah. Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro.

Dalam kerangka pemikiran itu berbagai *input* seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat *(capacity building)* melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat

---

[26] Ginandjar Kartasasmita,*Op.,Cit*

[27] Donald Brown, 1995, *"Poverty-Growth Dichotomy".* Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment.* New York: New York University Press.

menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.[28]

Pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa bantuan dana, prasarana, dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan dengan berpegang pada lima prinsip pokok.

Pertama**,** mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola (*acceptable*); ***kedua***, dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*); ***ketiga*****,** memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*); ***keempat*****,** hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (*sustainable*); dan ***kelima*****,** pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*)[29].Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:[30]

Pertama, upaya itu harus terarah (*targetted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

---

[28] Ginandjar Kartasasmita,*Op.,Cit*

[29] *Ibid.*

[30] *Ibid.*

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan *(empowering)* masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara sating menguntungkan dan memajukan.

Selanjutnya untuk kepentingan analisis, pemberdayaan masyarakat harus dapat dilihat baik dengan pendekatan komprehensif rasional maupun inkremental. Dalam pengertian pertama, dalam upaya ini diperlukan perencanaan berjangka, serta pengerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Dalam upaya ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. Dengan demikian,

programnya harus bersifat nasional, dengan curahan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti.

Dengan pendekatan yang kedua, perubahan yang diharapkan tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam derap yang sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. Pada satu sektor dengan sektor lainnya dapat berbeda percepatannya, demikian pula antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya. Dalam pendekatan ini, maka desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan teramat penting. Tingkat pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin kepada masyarakat.

Salah satu pendekatan yang mulai banyak digunakan terutama oleh LSM adalah advokasi. Pendekatan advokasi pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1960-an di Amerika Serikat (Davidoff, 1965). Model pendekatan ini mencoba meminjam pola yang diterapkan dalam sistem hukum, di mana penasehat hukum berhubungan langsung dengan klien. Dengan demikian, pendekatan advokasi menekankan pada pendamping dan kelompok masyarakat dan membantu mereka untuk membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan lainnya, membantu mereka mengorganisasikan diri, menggalang dan memobilisasi sumber daya yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dari kelompok masyarakat tersebut.[31]

3) Komunikasi Pembangunan

Proses pembangunan saat ini harus berakar dari bawah (*grassroots*),memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung

[31] *Ibid.*

tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia dan masyarakat. Dengan kata lain pembangunan harus menganut paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat.Dengan demikian, perlu adanya partisipasi secara aktif, penuh inisiatif daninovatif dari masyarakat itu sendiri. Sehingga partisipasi masyarakat dalam konteksini mengandung makna untuk meneggakan demokrasi local yang selama ini“terpendam” yang sebenarnya telah dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan proses pemberdayaan masyarakat harus mengandung makna yang dinamis untuk mengembangkan diri dalam mencapai kemajuan

Dalam paradigma komunikasi partisipatif-horisontal ini, semua massa-rakyat diundang untuk lebih berpartisipasi dalam proses komunikasi sampai dengan pengambilan keputusan. Komunikasi pendukung pembangunan dilaksanakan dalam model komunikasi horisontal, interaksi komunikasi dilakukan secara lebih demokratis. Dalam proses komunikasi, tidak hanya ada sumber atau penerima saja. Sumber juga penerima, penerima juga sumber dalam kedudukan yang sama dan dalam level yang sederajat. Karena itu kegiatan komunikasi bukan kegiatan memberi dan menerima melainkan “berbagi” atau “berdialog”. Isi komunikasi bukan lagi “pesan” yang dirancang oleh sumber dari atas, melainkan fakta, kejadian, masalah, kebutuhan yang dikodifikasikan menjadi “tema”. Dan tema inilah yang disoroti, dibicarakan dan dianalisa. Semua suara didengar dan diperhatikan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Maka yang terlibat dalam model komunikasi ini bukan lagi “sumber dan penerima” melainkan partisipan” yang satu dengan yang lain[32].

---

[32] Fred Wibowo, *Komunikasi Media Teater Rakyat*, Paper Workshop Komunikasi Teater Rakyat, Studio Audio Visual-Universitas Sanata Darma, Yogyakarta, Hal 2-3.

Dalam komunikasi partisipatif horisontal, media dalam wujud hardware (perangkat keras, alat-alat, mekanik) maupun *software* (perangkat lunak, program-program) juga mengambil peranan penting. Tapi bukan sebagai sarana penyebar informasi atau pesan, melainkan sebagai sarana penyaji tema[33]. Selain itu, praktek komunikasi partisipatif horisontal pertama-tama sangat menekankan proses pembebasan masyarakat secara kultural, dari budaya apa pun yang mengkondisikan mereka "miskin suara" atau yang kita kenal dengan "budaya bisu", Budaya bisu dicerminkan oleh situasi manakala sebuah kebijaksanaan diterapkan dan diperintahkan untuk dilaksanakan, masyarakat tidak pernah sadar atau berdaya untuk menilainya dahulu dari sudut kepentingan dan keuntungan mereka sehingga seringkali kebijakan pembangunan yang sesungguhnya lebih menguntungkan penguasa modal dan kekuasaan pemerintahan tidak mereka ketahui dan tinggal mereka laksanakan saja. Maka, pembebasan rakyat dari budaya bisu berarti menggalakkan upaya apa saja untuk membantu rakyat memunculkan kesadarannya terhadap apa saja yang dilaksanakan oleh negara ini, agar senantiasa bisa berorientasi pada kepentingan rakyat. Untuk itu dibutuhkan proses pendidikan politik yang intentis, yang membuat rakyat sadar akan hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tidak sekedar menjadi pelaksana, melainkan menjadi penentu segenap proses lahirnya kebijakan sampai pelaksanaan sebuah kebijakan.

4) Pendekatan Teori Pembangunan

Pembangunan sepertinya sebagai suatu fenomena yang tidak habis-habisnya dibahas dalam kerangka kajian keberlangsungan

---

[33] *Ibid*, Hal. 3

hidup manusia. Fenomena ini melekat sebagai salah satu ciri kehidupan manusia yang kerap mengalami perubahan menurut berbagai dimensi yang ada.

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagaiu bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan.

Selo Soemardjan[34] menyatakan bahwa perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh fihak-fihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia, kalau bisa dikatakan demikian, tidak terlepas dari fenomena pembangunan ini. Keaneka-ragaman, etnik, ras, kelompok, dan agama dengan bentuk dan tingkat kehidupan yang berbeda dalam masyarakat ini secara langsung maupun tidak langsung mendorong timbulnya perubahan dalam masyarakat sendiri atau menurut orientasinya ke luar masyarakat. Kurangnya komunikasi yang terjadfi antara para penentu kebijakan dengan rakyak kebanyakan, menyebabkan model atau bentuk pembangunan yang diterapkan lebih memperlihatkan suatu model *'top-down planning'* yang menurut satu kondisi dianggap lebih baik, namun dari sisi yang lain memberikan dampak yang kurang diharapkan; sejauh perkembangan masyarakat yang ada, ternyata

---

[34] Selo Soemardjan dan Soemardi Soelaiman,1974, *Setangkai Bunga Sosiologi.* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

sisi ke dua inilah yang dirasakan lebih memperlihatkan substansinya dalam masyarakat Indonesia ini.

Dalam perkembangan lebih lanjut, suatu proses pembangunan dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dasar masyarakat yang terlibat dalam proses ini bisa memenuhi seperangkat kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dari dinamika masyarakatnya. Terpaan dari faktor-faktor ekonomi yang menimbulkan krisis ekonomi pada tahun 1998 yang kemudian mengguncang sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, seolah-olah memberikan gambaran yang jelas bahwa selama ini belum ada konsep atau bentuk pembangunan yang jaelas dalam masyarakat ini; gambaran ini menunjukkan bahwa sedemikian rapuhnya nilai-nilai dasar tentang konsep pembangunan masyarakatnya. Fenomena inilah yang dijadikan dasaruntuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana peeranan teori modernisasi dan teori dependensi dalam melakukan pendekatan terhadap proses pembangunan yang terjadi di Indonesia. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi; bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharpakan bagi 'sebagian orang tersingkir' dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya[35]

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; ***pertama***, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan ***kedua***, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang

[35] Arif Budiman, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 1-2.

menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreatifitasnya[36]

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (continuity) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia merupakan amanat konstitusi (UUD 1945), yang menegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan di atas adalah melalui kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut meliputi semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan sosial budaya serta pertahanan-keamanan.

[36] *Ibid*, Hal. 13-14.

Proses pembangunan yang memuat sebenar-benarnya hakekat pembangunan adalah proses pembangunan yang memperhatikan terpenuhinya aspek-aspek pembangunan sumber daya manusia; yang terdiri dari : *capacity* (kemampuan untuk melakukan pembangunan), *equity* (pemerataan hasil-hasil pembangunan), *empowering* (pemberdayaan melalui pemberian hak atau wewenang untuk menentukan hal-hal yang dianggap penting) dan *sustainable* (kemampuan untuk hidup terus)[37]. Khususnya upaya untuk memberdayakan dan memampukan sumber daya manusia, merupakan suatu proses jangka panjang yang memerlukan investasi. Menurut Sadjono Jatiman, investasi itu bukan investasi ekonomi, tetapi merupakan investasi sosial budaya yaitu investasi sumber daya manusia. Dari nilai yang diinvestasikan tersebut akan menghasilkan keuntungan berupa meningkatnya kualitas hidup sumber daya manusia itu sendiri.[38]

Hakekat dari pembangunan negara kita adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Menurut Koten dalam INFID (1993), pembangunan adalah suatu proses yang didalamnya anggota masyarakat bisa meningkatkan kemampuan pribadi dan kelembagaan mereka, untuk mengerahkan dan mengelola sumberdaya yang tersedia, demi menciptakan perbaikan-perbaikan mutu kehidupan mereka secara sinambung dan adil, yang sesuai dengan aspirasi-aspirasi mereka sendiri. Lebih lanjut ia menandaskan, pembangunan bukanlah persoalan pertumbuhan atau peningkatan hasil, melainkan

---

[37] Riswandha Imawan, 1990, *Menciptakan Birokrasi yang Responsif untuk Pembangunan Martabat Manusia*, Gadjah Mada Press Yogyakarta.

[38] Tri Winarni, 1998, *Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21, Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Fisipol UGM, Aditya Media, Yogyakarta, hal. 73.

transformasi yang merujuk pada keadilan, kesinambungan dan inklusifitas sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat global. Apabila pembangunan tidak mengacu pada hal tersebut, maka akan terjadi konflik yang menghadapkan masyarakat dengan masyarakat dan atau masyarakat dengan negara.[39]

Secara jujur harus diakui, bahwa konflik social yang meletus dan meluas sejak tuntutan reformasi di tahun 1998 hanyalah merupakan satu dari banyak "buah" politik dari pemerintah Orba yang sentralistik dan otoriter selama kurun waktu yang cukup panjang. Agar tidak terulang kesalahan tersebut diatas, maka saat ini perlu digalakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam hal mendukung transparansi pemanfaatan dan pemerataan dana publik. Mengingat masyarakat lokal yang hingga saat ini dalam kenyataannya dari sisi kapasitas tawar (*bargaining power*) akibat keterbatasan "informasi" yang diperoleh dan kesibukan harian untuk ekonomi keluarga adalah yang paling lemah, maka kapasitas ini harus ditingkatkan. Konsepsi inilah yang secara luas dikenal dengan upaya pemberdayaan masyarakat (*empowering local community*), khususnya dalam mendukung transparansi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (*good governance*) sebagai bagian dari negara yang menganut demokrasi, dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat secara adil.

Konsep pemberdayaan masyarakat atau masyarakat yang berdaya dalam konteks kekinian adalah masyarakat yang memiliki kepedulian dan kapasitas dalam menetapkan prioritas dan pemanfaatan dana publik yang sangat penting bagi upaya untuk

---

[39] Pembangunan di Indonesia: memandang dari sisi lain / penyunting INFID "1993, Jakarta: Yayasan Obor.

meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Sumodiningrat *dalam* Sardjono[40] mengemukakan, bahwa keberdayaan masyarakat secara umum adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan hidup; dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan hidup.[41] Dengan keberdayaan tinggi, masyarakat tidak saja akan mampu mempertahankan hak-haknya (termasuk dalam pengambilan keputusan), terutama dalam berhubungan dengan pemerintah ataupun pihak pengusaha.

Upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang tidak terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial, tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan politik. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkakan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi.

Kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat, atau dari kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah. Selama ini upaya pemberdayaan bagi kelompok masyarakat atau keluarga miskin dilakukan melalui penyediaan akses dan bantuan dari pemerintah dalam bentuk pelayanan pendidikan dan kesehatan,

---

[40] Sardjono MA. 2004, *Mosaik Sosiologi Kehutanan: masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*. Jogyakarta: Debut press.

[41] *Ibid.*

pemberian bantuan modal, manajemen usaha, pendampingan, dan pembangunan prasarana pendukung, namun hal tersebut ternyata belum cukup memadai, sedangkan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dalam menghadapi masalah sosial-ekonomi atau mendapat musibah di luar kehendaknya telah dilakukan melalui berbagai skema perlindungan secara informal maupun formal dengan dukungan keluarga, kelompok masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, usaha swasta, dan pemerintah.

Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan keperdulian masyarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan.

Kondisi politik yang terjadi di beberapa daerah terutama di Aceh, Irian Jaya, dan Maluku dipicu oleh kesenjangan sosial dan ekonomi, tuntutan masyarakat terhadap penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan, serta perbedaan yang muncul akibat keragaman suku, budaya, adat, kebiasaan dan agama. Permasalahan tersebut perlu dipecahkan secara serius dan bertahap dengan melibatkan masyarakat secara langsung yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat seperti lembaga adat, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan pemerintah.[]

PONPES MODERN SYECH WALID THAIB SALEH INDRAGIRI

BAB III

Pemberdayaan Masyarakat Saat Ini dan Permasalahan yang Dihadapi

A. Pendahuluan

Satu masalah penting dalam proses pembangunan di negara yang sedang berkembang adalah adanya asas *"the government can do not wrong".* Asas ini menyebabkan sulitnya tumbuh sikap akomodatif dan bertanggung jawab di kalangan aparat negara. Karena pemenintah tidak dapat bersalah, maka aparatnya pun tidak dapat disalahkan. Pemerintah Indonesia telah mendirikan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggantikan asas the government *can do not wrong* termasuk aparatnya menjadi asas *the government can do wrong*.[1]

Memberdayakan rakyat adalah suatu konsep politis yang berarti menata kembali hubungan antara negara dan rakyat dan antara kaya dan miskin, dan bukan hanya sekadar memberi kail pada

[1] Asep Saepul Mualim, *Meningkatkan Ketahanan Nasional Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi.* http// *moegrafis.blogspot.com/2011/.../meningkatkan-ketahanan-nasional-dalam-menghadapi-Era-Globalisasi.* Diakses tanggal 30 Juli 2012.

rakyat. Meskipun diberi kail rakyat tidak akan dapat banyak berbuat apabila ikan-ikan di sungai telah habis ditangkap nelayan besar itu sangat penting dijaga dan dimantapkan stabilitas keamanan dari aspek kehidupan lainnya. Stabilitas ini merupakan sarat mutlak dalam pembangunan. Tidak ada investor yang mau menanamkan modalnya jika stabilitas di negara ini tergoncang. Begitu pula tidak ada ketenangan bagi rakyat untuk turut berpàrtisipasi dalam pembangunan nasional.

Selain diperlukannya stabilitas keamanan dalam pembangunan nasional, maka yang lebih esensial harus dipadukan atau dimantapkan ialah kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak untuk mencapai karsa dalam cita-cita nasional, tujuan nasional, tujuan Pembangunan Nasional, sasaran pembangunan nasional, dan kepentingan Nasional. Begitu pula di dalam gerak pembangunan nasional yang intensif dilakukan sekarang adalah masalah keterpaduan yang masih perlu mendapat perhatian, baik itu antara pemerintah masyarakat, antar Pusat Daerah, antar sektor-sektor pembangunan maupun di dalam sektor pembangunan. Hal ini harus diupayakan oleh para elit kepemimpinan nasional pada suprastruktur dan infrastruktur baik di tingkat pusat maupun daerah.[2]

Dengan konsep keterpaduan ini (Pendekatan Ketahanan Nasional), dapat di praktekkan dalam sikap gerak pembangunan nasional, bukan hanya efisiensi yang dapat diperoleh, tetapi juga hasil pembangunan nasional tersebut akan lebih bermanfaat atau lebih meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (kesejahteraan dan keamanan), sehingga mempunyai dampak yang luas dalam meningkatkan ketahanan nasional dalam segala aspek kehidupan

[2] *Ibid.*

bangsa Indonesia (ideologi politik, ekonomi sosial budaya dan hankam). Maka dengan memperhatikan konsepsi ketahanan nasional dan hakikat nilai-nilai pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan nasional yang ingin dicapai, sehingga sangat mungkin melaksanakan pembangunan dengan pendekatan ketahanan nasional. ini berarti ketahanan nasional tidak hanya sebagai "kondisi", tetapi juga sebagai *"metode"* untuk menjelaskan dan meramalkan masalah-masalah pembangunan.[3]

Setiap masalah yang ada dalam pembangunan nasional mengakibatkan kondisi tertentu dalam ketahanan nasional. Dengan ketahanan nasional yang terus meningkat di segala aspek kehidupan bangsa, bangsa Indonesia akan tetap *"survive",* betapa pun besarnya badai kehidupan yang datang menghantamnya di era kesejagatan ini. Badai tersebut pasti akan dapat di atasi dan pasti berlalu. Untuk dapat mengoperasionalkan pendekatan ketahanan nasional perlu mengetahui pendekatan kesisteman, karena ketahanan nasional merupakan suatu sistem. Kriteria suatu sistem dipenuhi oleh ketahanan nasional, yakni adanya komponen-komponen yang saling berinteraksi satu sama lain (astagrata) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni peningkatan kesejahteraan dan keamanan.

Aspek Asta Gatra, yaitu : merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuhberupa hubungan timbal balik yang erat dan saling ketergantungan antara Tri Gatra dan Panca Gatra, pendekatan yang dilakukan adalah untuk memadukan dan mengintegrasikan beberapa aspek gatra di atas dalam rangka percepatan pembangunan di

---

[3] *Ibid.*

daerah tertinggal dengan tujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan nasional.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sebagai suatu pendekatan partisipatif, fokusnya tidak hanya pada bukan hanya sebagai penerima tetapi ikut serta dalam proses pembangunan, baik dalam perencanaan, pembangunan dan pengawasan, guna mengoptimalkan percepatan pembangunan nasional.

B. Pemberdayaan Masyarakat Saat Ini

Pemberdayaan Masyarakat saat ini dapat dilihat dari sudut pandang asta gatra :

a) **Gatra geografi,** dilihat dari kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau baik besar dan kecil dengan wilayah daratan dan lautan yang sangat luas serta posisi silang Indonesia yang sangat strategis membawa implikasi adanya kandungan sumber kekayaan alam yang berlimpah dan beraneka ragam yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, pembangunan nasional merupakan sistem keruangan yang terdiri dari aspek fisik dan aspek manusia. Aspek fisik antara lain meliputi lahan, iklim, air, dan udara. Adapun aspek manusia meliputi tenaga kerja, tradisi kehidupan, teknologi, dan ekonomi masyarakat. Analisis hubungan antara aspek fisik dan manusia tersebut dalam studi geografi sangat bermanfaat untuk menyusun diversifikasi pemerataan pembangunan nasional. Namun disisi lain perbedaan kondisi geografi tiap daerah merupakan kendala untuk memeratakan pembangunan nasional.

b) **Gatra Demografi,** dilihat Pernyataan PBB yang baru-baru ini menyatakan bahwa setengah dari penduduk Indonesia adalah masyarakat miskin dengan penghasilan kurang dari US$ 2 per hari, Kwik Kian Gie mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena adanya kekeliruan dalam arah pembangunan negara Indonesia.[4] Beliau berpendapat bahwa pengelolaan seluruh sektor yang ada pada saat ini belum dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, salah satu contoh pengelolaan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan sumber daya hutan serta kelautan yang masih banyak diserap dan dimanfaatkan oleh masyarakat luar negeri.

c) **Gatra Kekayaan Alam,** dilihat sumber kekayaan alam yang berlimpah khususnya yang terkait dengan sektor pertanian seperti; lahan, pengairan, iklim dan aneka ragam tanaman pertanian apabila dimanfaatkan secara baik dan maksimal maka merupakan potensi yang sangat besar didalam pembangunan sektor pertanian. Namun disisi lain eksplorasi yang berlebihan tanpa memperhatikan kearifan lokal dan melibatkan masyarakat tempatan tersebut akan menyebabkan berkurang dan rusaknya sumber kekayaan alam yang dimiliki sehingga akan menghambat pembangunan nasional.

d) **Gatra Idiologi,** dilihat dari dimensi idiologis, pancasila secara tegas mengisyaratkan muatan-muatan peran serta. Secara signifikan hampir semua sila-silanya mengedepankan

---

[4] Budi Suwarna dan *M. Yunus, Bankir Kaum Papa*, Artikel Kompas tanggal 14 Oktober 2006.

perlunya sebuah tekad dan semangat untuk berkiprah secara nyata dalam kehidupan kebangsaan. Nilai-nilai instrumental dari idiologi Pancasila amat mengedepankan sebuah tatanan kehidupan kebangsaan yang lebih meletakkan perannya pada pemberdayaan potensi masyarakat. Itu maknanya pemerintah pada dasarnya hanya bertindak sebatas fasilitator. Peran paling dominan justru harus diberikan kepada rakyat. Jika kemudian terjadi stagnasi idiologis, terutama munculnya deviasi antara nilai instrumental dengan nilai parksinya, semua itu disebabkan kuatnya orientasi vertikal. Pemasungan idiologis secara sistematika direkayasa selama 21 tahun terakhir ini telah membuat sebagian besar masyarakat menjadi apatis idiologis. Akibatnya nilai-nilai idiologis tidak secara maksimal terinteralisasi dalam orientasi dan sikap masyarakat dalam memberikan kontribusinya bagi kehidupan dan kesejahteraan bangsanya. Apatisme itu menjadi mengkristal seiring derasnya berbagai faham dan terutama idiologi asing tersebut telah merecoki orientasi dan sikap hidup masyarakat. Dampaknya adalah munculnya kehidupan dan makin individualistis dan rendahnya sikap peduli, yang telah mendatangkan berbagai implikasi pada bidang-bidang lainnya.

e) **Gatra Politik,** kehidupan politik dalam sistem politik nasional pada era orde baru diyakini tidak memberi peluang dan kebebasan berperan. Melalui keputusan politik massa mengambang (*floating mass*) posisi masyarakat dengan mudah dapat terpinggirkan dalam setiap proses

politik. Dengan rata-rata tingkat pendidikan warga belum memadai, ditenggarai oleh masih rendahnya kesadaran berpolitik, proses pembusukan dan pembodohan politik dapat berlangsung dengan aman. Akibatnya tidak tercipta komunikasi yang inten antara elit politik dengan pendukungnya. Orsospol tidak memiliki program siginifikan dalam pendidikan politik rakyat. Rakyat hanya diperlukan ketika pemilu telah dekat waktu. Sehingga eksitensi Orsospol tidak lebih hanya sekedar kesadaran politik untuk kepentingan dan target tertentu. Tidak mengherankan jika selama ini rakyat tidak terwakilkan dan tidak merasa terwakili. Tidak dapat dipungkiri pemusatan kekuatan dan kekuasaan pada satu tangan telah menimbukan beragam kebijakan yang menjurus pada mempertahankan *status quo*. Implikasi politik yang ditimbulkan sungguh sangat luas. Bukan hanya rakyat terhambat berpartisipasi, lebih dari itu rakyat selalu menjadi obyek, dan tercekam dalam kekhawatiran dan ketakutan.

f) **Gatra Ekonomi**, dilihat dari proses pembangunan ekonomi, secara sadar atau tidak dalam prakteknya, selama ini telah didominasi oleh pemikiran praktek ekonomi kapitalisme abab ke XIX, ini terbukti dengan tumbuhnya semakin kokoh kelas pemupuk rante dalam ekonomi Indonesia yang pada umumnya para konglomerat. Konsentrasi kekuatan ekonomi yang dikuasai para konglomerat sampai dengan 70 % menunjukkan belum adanya moralitas ekonomi dalam proses ekonomi rakyat. Ditambah lagi dominasi itu menjadi semakin kuat dengan adanya jalinan

hubungan elit kekuasaan para birokrat yang akhirnya membentuk apa yang disebut "*Distributional Coalition''.* Pemberian kebebasan tanpa batas pada konglomerasi tanpa dukungan fundamental ekonomi yang kuat ternyata dapat mempercepat kolapsnya ekonomi kita. Terasa sekali akibatnya jika mengabaikan faktor pemerataan. Pertumbuhan yang selalu tinggi justru mempercepat proses kesenjangan, apalagi tanpa dukungan oleh kebijakan yang mengacu pada kepentingan ekonomi rakyat bawah.

g) **Gatra Sosial Budaya**, salah satu penyebab krisis di negara kita, terletak pada rendahnya moral dan etikan bangsa. Indikasi yang paling nyata dapat dilihat dari tampilan dalam menyikapi dan merespon krisis saat ini. Mestinya dalam situasi sulit kita harus lebih dapat bersatu (*in crusial thing unity).* Tetapi apa yang terjadi, justru diantara kita saling cuci tangan dan saling menyalahkan. Yang ada adalah melepas tanggungjawab atau mencari kambing hitam. Sikap seperti ini tentu bukan bagian dari wujud pemberdayaan masyarakat. Karena yang dilakukan hanyalah mengritik tanpa solusi, timbulnya berbagai keruwetan dan bahkan ketidaktertiban yang ada pada sentra-sentra kehidupan menunjukkan rendahnya disiplin nasional kita. Berbagai kebijakan publik memang telah ada dan dibuat untuk merangsang iklim peran serta yang kondusif. Keinginan itu ternyata tidak diimbangi oleh konsitensi pemerintah. Inkonsitensi yang telah membudaya dikalangan aparat dan birokrasi itulah yang

membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Resiko dari budaya paternalistik telah membuat masyarakat kehilangan daya kritis. Yang subur justru budaya ABS (asal bapak senang) baik dikalangan bawah maupun kalangan atas. Kehilangan daya kritis jelas amat merugikan bagi pemberdayaan masyarakat.

h) **Gatra Hankam**, Pendekatan yang seimbang antara keamanan dan kesejahteraan ternyata tidak dilakukan dengan konsekuen. Implementasi di lapangan dalam menangani berbagai permasalahan stabilitas masih lebih mengedepankan pendekatan dari aspek keamanan. Munculnya gugatan masyarakat akhir-akhir ini terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia menjadi bukti pendekatan keamanan masih dominan. Apatisme masyarakat terhadap hankam pada dasarnya merupakan dampak sampingan dari ekses penanganan keamanan. Sistem pertahanan rakyat sementara (sishankamrata) sebagai doktrin pertahanan negara belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat bela negara dapat dilihat lemahnya kepedulian masyarakat terhadap ancaman yang kita hadapi. Rakyat belum terbiasa mengorganisir diri dalam tindakan-tindakan keamanan yang mengancam keselamatan dirinya sendiri, lingkungannya, apalagi yang mengancam bangsa dan negara. Pam swakarsa sebagai wujudk dan implementasi dari kepedulian masyarakat terhadap pentingnya keadaan aman dan rasa aman belum juga dapat diberdayakan secara maksimal.

Paradigma pembangunan yang berciri vertical *top-down* ini memunculkan beberapa masalah serius. Dalam konteks Indonesia, pembangunan yang diterapkan sesuai dengan model itu menimbulkan beberapa permasalahan di bidang politik, ekonomi dan budaya, baik di tingkat negara maupun massa-rakyat/*grass-root level*. Di tingkat negara, terjadi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara-negara donor. Bahkan ketergantungan tidak terbatas dalam hal modal saja, melainkan juga kebijakan ekonomi. Alhasil, kebijakan ekonomi Indonesia tidak pernah mandiri. Proyek-proyek yang diadakan dengan bantuan modal, teknologi dan tenaga ahli asing tidak pernah berjalan efektif-efisien seiring kepentingan bangsa, melainkan lebih tertuju untuk memenuhi kepentingan negara-negara donor. Sementara itu, Indonesia semakin terdesak untuk ikut ambil bagian dalam pasar bebas yang dipelopori oleh negara-negara maju, tetapi sebenarnya tidak mempunyai kekuatan untuk menentukan mekanisme pasar sebagaimana yang bisa dilakukan oleh negara maju sebagai bentuk intervensi negara terhadap mekanisme pasar yang katanya bebas.

Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan nasional saat ini, dikarenakan :

1. Masih rendahnya sumber daya manusia.
2. Masih terbatasnya regulasi khususnya di daerah-daerah yang memberikan peluang terhadap pelibatan peran serta masyarakat.
3. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.
4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

C. Implikasi pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional

a) *Implikasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap komunikasi politik*

Pembangunan di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia memiliki keterkaitan antar ruang, waktu dan persoalan dengan segala situasi yang terbentuk di lingkup global/ internasional. Seusai Perang Dunia II, banyak negara dunia ketiga yang terlibat perang (langsung maupun tidak) pada umumnya dilanda krisis yang parah. Negara-negara itu umumnya baru saja merdeka dari kolonialisme negara-negara Eropa, sehingga banyak terjadi goncangan dan perubahan dalam konstruksi politik intern maupun dalam hubungan internasional. Sementara itu, struktur dan sistem ekonomi belum tertata dengan mantap, oleh karena begitu rapuhnya struktur ekonomi yang diwariskan negara penjajahnya. Demikian pula di tingkat kondisi kultural. Walaupun kemerdekaan politis telah diperoleh, belum tentu kemerdekaan kultural dalam arti merdeka secara mental telah dimiliki.[5]

Untuk memperbaiki kondisi dunia, terutama pada awalnya kondisi negara-negara Eropa Barat, dan (baru kemudian setelah itu) negara dunia ketiga, Amerika Serikat berinisiatif memunculkan program bantuan ekonomi bertitel Marshall Plan. Bantuan itu mencakup dukungan modal, teknologi, program-program pembangunan dan tenaga ahli. Tujuannya adalah untuk

---

[5] Felix Iwan Wijayanto, *Komunikasi dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*, Http//*kalimasada.blogdetik.com/.../komunikasi-partisipatif-dalam-proses-Pemberdayaan Masyarakat.* Diakses Tanggal 28 Juli 2012.

mempercepat peningkatan dan pertumbuhan ekonomi negara penerima bantuan, tentu saja dengan mekanisme pengaturan strategi sesuai proposal negara donor. Begitulah selanjutnya bantuan itu (tentu saja) mengkondisikan negara Eropa lebih dahulu berhasil menata kembali kondisi ekonominya (oleh karena basis ekonomi yang lebih mantap tertata sebelum perang) dibandingkan negara bekas koloni. Sejak itu, dimulailah penerapan paradigma pembangunan yang mempunyai karakter: *vertical top-down* (pola pembangunan ditransferkan begitu saja dari negara donor kepada negara penerima bantuan), bertumpu pada investasi modal asing, dan dijalankan sesuai dengan program dan rencana proyek negara-negara maju, dan diterapkannya teori *trickle-down effect* atau efek tetesan ke bawah, yang asumsinya: manfaat program-program intervensi sosial di negara-negara dunia ketiga akan menetes ke bawah kepada setiap orang, mulai dari mereka yang berada dalam kelompok-kelompok sosial ekonomi paling atas yang pertama-tama mengakses pesan-pesan kemajuan atas dukungan kemampuan ekonomi mereka, dan selanjutnya diteruskan kepada mereka yang berada dalam kelompok-kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah.[6]

Paradigma pembangunan yang berciri *vertical top-down* ini memunculkan beberapa masalah serius. Dalam konteks Indonesia, pembangunan yang diterapkan sesuai dengan model itu menimbulkan beberapa permasalahan di bidang politik, ekonomi dan budaya, baik di tingkat negara maupun massa-rakyat/*grass-root level.* Di tingkat negara, terjadi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara-negara donor. Bahkan ketergantungan tidak terbatas dalam hal modal saja, melainkan juga kebijakan

---

[6] Zulkarimein Nasution, 1988, *Komunikasi Pembangunan,* Erlangga, Jakarta, Hal. 75

ekonomi. Alhasil, kebijakan ekonomi Indonesia tidak pernah mandiri. Proyek-proyek yang diadakan dengan bantuan modal, teknologi dan tenaga ahli asing tidak pernah berjalan efektif-efisien seiring kepentingan bangsa, melainkan lebih tertuju untuk memenuhi kepentingan negara-negara donor. Sementara itu, Indonesia semakin terdesak untuk ikut ambil bagian dalam pasar bebas yang dipelopori oleh negara-negara maju, tetapi sebenarnya tidak mempunyai kekuatan untuk menentukan mekanisme pasar sebagaimana yang bisa dilakukan oleh negara maju sebagai bentuk intervensi negara terhadap mekanisme pasar yang katanya bebas.[7]

Ketergantungan ekonomi berimbas pada ketergantungan politik Indonesia terhadap kebijakan politik donatur (IGGI/CGI, IMF) maupun investor non-organisasi internasional, sehingga begitu mudahlah donatur mendikte arah politik dalam negara Indonesia. Adalah hal yang masuk akal misalnya, jika negara-negara maju lebih memberikan dukungan (support) terhadap rejim tertentu, jika rejim tersebut dinilai berhasil mempertahankan kepentingan negara maju di Indonesia. Meski hal ini mengabaikan aspirasi politik massa-rakyat Indonesia sendiri. Demikian pula sebaliknya, negara maju bisa saja segera berubah pikiran sejauh stabilitas politik di Indonesia tidak bisa lagi dijamin oleh rejim tertentu dan menyebabkan stabilitas ekonomi rapuh dan terlalu riskan bagi investasi modal negara maju dilanjutkan di Indonesia.[8]

Ketergantungan di tingkat politik dan ekonomi menimbulkan ketergantungan kultural. Mentalitas dan cara berpikir masyarakat, sejak dari kaum elit pemegang kekuasaan negara sampai massa-rakyatnya diformat menurut pola-pola propaganda kebudayaan

---

[7] Felix Iwan Wijayanto, *Op., Cit*

[8] *Ibid.*

negara-negara maju. Segala sesuatu yang menjadi sikap keseharian warga serba disesuaikan, diadaptasikan dengan selera negara maju. Maka, tak jarang terlihat banyak orang Indonesia mematut-matut diri agar senantiasa sesuai dengan gaya hidup, sikap, bahasa, selera, trend masyarakat negara maju, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.[9]

Di tingkat masyarakat, terjadi ketidakberdayaan di bidang politik, ekonomi maupun budaya. Kekuasaan politik negara yang dijalankan oleh lembaga eksekutif tanpa mekanisme kontrol lembaga legislatif sebagaimana manifestasi negara berkedaulatan rakyat. Bahkan, mekanisme kerja lembaga legislatif pun pada akhirnya tidak mampu dikontrol oleh masyarakat pemilihnya (mengingat dalam perkembangannya, lembaga legislatif semacam DPR lebih mencerminkan kepentingan elit partai politik ketimbang massa-rakyat yang diwakilinya). Pertumbuhan ekonomi yang bersendikan pertumbuhan kapital tidak diimbangi pemerataan pendapatan mengakibatkan kekayaan tertimbun pada kelompok minoritas yang superior dalam penguasaan modal dan sumber daya, sementara kelompok mayoritas tetap terpinggirkan.

Penerapan model "tetesan ke bawah" tidak mampu memberi hasil yang direncanakan. Pada kenyataannya, manfaat pembangunan tidak pernah "menetes" sampai jauh "ke bawah", tetapi hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat yang berada dalam kelas sosial teratas. Di banyak negara dunia ketiga, fenomena ini terlihat jelas dari timbulnya ketimpangan sosial ekonomi yang semakin parah[10]. Sementara itu sentralisasi informasi yang didukung perkembangan teknologi berlangsung begitu imperialistis

[9] *Ibid.*
[10] *Ibid.*

sehingga masuklah peradaban Barat tanpa seleksi atau reserve. Hal ini menimbulkan erosi moral dan etika massa-rakyat seiring dengan proses yang sama yang terjadi dengan kaum elitnya. Dalam kurun waktu sampai tahun-tahun terakhir abad ke-20, serangkaian masalah itu terakumulasi sehingga memunculkan situasi krisis politik, ekonomi maupun budaya sampai saat ini.

Kondisi yang mensubordinasikan Indonesia dan negara-negara dunia ketiga dalam situasi global dunia; maupun subordinasi massa-rakyat berhadapan dengan pemegang kekuasaan negara dalam konteks situasi Indonesia (menurut Galtung: hubungan negara centre [C] dengan negara periphery [P] maupun antara centre-nya negara *periphery* [CP] dan periphery-nya negara periphery [pP], dalam[11] sangat dilestarikan oleh pola-pola komunikasi. Oleh karena itu, digunakanlah pendekatan komunikasi pembangunan, yakni disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana, untuk meningkatkan "pembangunan manusiawi", yang berarti komunikasi dilakukan dengan tujuan untuk menghapuskan kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan.[12]

Salah satu kajian penting dalam pendekatan komunikasi pembangunan adalah permasalahan betapa rendahnya partisipasi rakyat dalam proses pembangunan akibat minimalnya kesempatan terjadinya komunikasi yang adil dan seimbang antara rakyat dan pembuat keputusan negara dalam menentukan jalannya proses pembangunan. Keprihatinan ini dicerminkan oleh proses

[11] Windhu, I. Marsana, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, Hal. 41-54.
[12] Zulkarnain Nasuition, *Op, Cit.* Hal. 82.

pembangunan yang tidak selalu mengutamakan kepentingan dan partisipasi rakyat, melainkan lebih berorientasi pada kepentingan politis (stabilitas, status-quo, kekuasaan), akumulasi modal dan pertambahan keuntungan elit ekonomi, maupun superioritas dan dominasi pengaruh dalam lingkungan kultural bangsa.

Paradigma lama komunikasi pembangunan menekankan pada proses komunikasi manusia yang dalam model komunikasi linier konvensional. Model ini merupakan gambaran proses komunikasi yang berlangsung secara linier (searah) dari sumber kepada penerima melalui media (sumber-pesan-media-penerima). Model linier-konvensional tersebut dapat pula tergambarkan secara vertikal mengingat struktur stratifikasi sosial masyarakat terbagi menurut kelas atas, menengah dan bawah.

Asumsi dasar paradigma ini adalah bahwa komunikasi sangat diperlukan dalam pemecahan masalah-masalah masyarakat, dengan memberikan penekanan elemen kognitif komunikasi (elemen komunikasi yang mempunyai sasaran pada perubahan pola pikir atau ideologi). Komunikasi dirancang sedemikian rupa sehingga pesan-pesan persuasif yang telah dibakukan secara terpusat disuntikkan sebanyak mungkin kepada masyarakat. Asumsinya, semakin banyak pengaruh persuasif (yang positif dan konstruktif) disuntikkan, masyarakat semakin tergerak untuk melakukan apa yang diprogramkan dalam pembangunan, sesuai format pesan tersebut, karena pola pikirnya telah berhasil diubah lewat proses komunikasi itu [13].Kelemahan paradigma lama ini, terletak pada diabaikannya aspek struktural dari proses pembangunan (kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi, kaitan kultural, pengawasan media) Bahkan,

---

[13] Oepen, Manfred (ed.), 1988, *Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat* (P3M), Media Rakyat, Jakarta, Hal. 1.

penekanannya pada kecanggihan teknologi komunikasi (terutama media massa), yang begitu diyakini mampu membawa perubahan psikologis individu dan sosial, dengan serta merta menggusur kemungkinan diperhatikan dan dikembangkannya model-model tradisional komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*) dan komunikasi kelompok (*group communication*), yang pada kenyataannya masih sangat menentukan keberhasilan komunikasi dalam masyarakat di banyak daerah di Indonesia.

Kritik terhadap paradigma lama tersebut secara kritis dirumuskan dalam imperialisme "budaya" atau *imperialisme* "media", yaitu pandangan bahwa media dapat membantu "modernisasi" dengan memperkenalkan nilai-nilai "barat" dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya "keaslian" budaya lokal. Secara sederhana, dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai yang diperkenalkan itu adalah nilai-nilai kapitalisme dan karenannya prosesnya "*imperialistis*" serta dilakukan secara sengaja, atau disadari dan sistematis, yang menempatkan negara yang sedang berkembang dan lebih kecil di bawah kepentingan kekuasaan kapitalis yang lebih dominan khususnya Amerika Serikat.[14]

Tahun 1976 Everett M. Rogers[15] memproklamasikan usangnya paradigma lama komunikasi pembangunan, yang segera disusul pemunculan tesis-tesis baru tentang perombakan komunikasi pembangunan. Untuk itu dibutuhkan strategi pembangunan yang lebih mandiri dan adil bagi masyarakat lapisan bawah secara terdesentralisasi yang sama sekali berbeda dengan model "*top-*

---

[14] McQuail, Denis, 1994, *Teori Komunikasi Massa,* Erlangga, Jakarta. Hal 99.

[15] Everett M. Rogers, 1976, *Communication in Organization,* New York: The Free Press.

down”[16]. Seirama dengan itu, pemikir pembangunan Indonesia, Soedjatmoko (1987), menyatakan bahwa yang seharusnya menjadi prioritas perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Indonesia adalah kemampuan untuk berkembang baik secara sosial, ekonomis maupun politis, di semua tingkat dan dalam semua komponen masyarakat, sehingga memungkinkan bangsa yang bersangkutan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, lalu “*survive*” di tengah-tengah dunia yang tidak stabil, rumit dan makin tunduk pada persaingan. Pembangunan harus tidak sebagai sesuatu yang diperbuat lewat kegiatan dan ketrampilan yang diperoleh melainkan sebagai sesuatu yang berlangsung sebagai proses belajar. Maka dimulailah era paradigma baru komunikasi dalam pembangunan di Indonesia, yang lebih berciri partisipatif horisontal.

Dalam era kemunculan paradigma baru komunikasi pembangunan yang partisipatif horisontal tersebut dimunculkanlah kembali (revitalisasi) konsep komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*), media rakyat (*folk media*), komunikasi kelompok (*group communication*) dan model komunikasi dua tahap (*two-step flow communication*). Selain itu, oleh karena ikatan kultural di banyak daerah, masyarakat Indonesia masih mengakui kharisma agen perubahan atau opinion leader (pemuka pendapat dalam masyarakat seperti kyai, guru, kadus, pemuka adat.) sebagai aktor penting dalam proses komunikasi masyarakat [17]. Akan tetapi, pentingnya peranan opinion leader tidak bisa diartikan sebagai “penguasa baru” melainkan hanyalah sosok panutan yang menjadi jembatan perantara diadakannya perubahan pola komunikasi lama

[16] Oepen, *Op., Cit,* Hal. 2
[17] *Ibid.*

yang vertikal dan tergantung media menuju pola komunikasi yang horisontal yang sepenuhnya mengandalkan demokratisasi dan partisipasi rakyat.

Dalam paradigma komunikasi partisipatif horisontal ini, semua massa-rakyat diundang untuk lebih berpartisipasi dalam proses komunikasi sampai dengan pengambilan keputusan. Komunikasi pendukung pembangunan dilaksanakan dalam model komunikasi horisontal, interaksi komunikasi dilakukan secara lebih demokratis. Dalam proses komunikasi, tidak hanya ada sumber atau penerima saja. Sumber juga penerima, penerima juga sumber dalam kedudukan yang sama dan dalam level yang sederajat. Karena itu kegiatan komunikasi bukan kegiatan memberi dan menerima melainkan "berbagi" atau "berdialog". Isi komunikasi bukan lagi "pesan" yang dirancang oleh sumber dari atas, melainkan fakta, kejadian, masalah, kebutuhan yang dikodifikasikan menjadi "tema". Dan tema inilah yang disoroti, dibicarakan dan dianalisa. Semua suara didengar dan diperhatikan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Maka yang terlibat dalam model komunikasi ini bukan lagi "sumber dan penerima" melainkan partisipan" yang satu dengan yang lain [18].

Dalam komunikasi partisipatif horisontal, media dalam wujud *hardware* (perangkat keras, alat-alat, mekanik) maupun *software* (perangkat lunak, program-program) juga mengambil peranan penting. Tapi bukan sebagai sarana penyebar informasi atau pesan, melainkan sebagai sarana penyaji tema[19] Selain itu, praktek komunikasi partisipatif horisontal pertama-tama sangat

---

[18] Fred Wibowo, 1994, *Komunikasi Media Teater Rakyat, Paper Workshop Komunikasi Teater Rakyat,* Studio Audio Visual-Universitas Sanata Darma, Yogyakarta, Hal. 2-3.

[19] *Ibid,* Hal. 4

menekankan proses pembebasan masyarakat secara kultural, dari budaya apa pun yang mengkondisikan mereka “miskin suara” atau yang di kenal dengan “budaya bisu”[20]. Budaya bisu dicerminkan oleh situasi manakala sebuah kebijaksanaan diterapkan dan diperintahkan untuk dilaksanakan, masyarakat tidak pernah sadar atau berdaya untuk menilainya dahulu dari sudut kepentingan dan keuntungan mereka sehingga seringkali kebijakan pembangunan yang sesungguhnya lebih menguntungkan penguasa modal dan kekuasaan pemerintahan tidak mereka ketahui dan tinggal mereka laksanakan saja. Maka, pembebasan rakyat dari budaya bisu berarti menggalakkan upaya apa saja untuk membantu rakyat memunculkan kesadarannya terhadap apa saja yang dilaksanakan oleh negara ini, agar senantiasa bisa berorientasi pada kepentingan rakyat. Untuk itu dibutuhkan proses pendidikan politik yang intentis, yang membuat rakyat sadar akan hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tidak sekedar menjadi pelaksana, melainkan menjadi penentu segenap proses lahirnya kebijakan sampai pelaksanaan sebuah kebijakan.

Adapun implikasi yang diharapkan guna peningkatan komunikasi politik adalah:

a. Menumbuhkan kesadaran diri untuk mendukung tatanan politik demokrasi pancasila, maka budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab perlu terus dikembangkan, didukung oleh moral dan etik politik yang bersumber pada nilai-nilai pancasila serta sikap kenegarawanan di dalam perilaku politik;
b. Pembangunan nasional berbasis pemberdayaan masyarakat di harapkan dapat meningkatkan komunikasi politik bangsa

[20] Lihat Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat [P3M], 1989.

Indonesia, hal ini mengingat masih lemahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

c. Pembangunan nasional harus selalu memperhatikan pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menuju masyarakat madani seperti yang di cita-cita oleh pendiri bangsa Indonesia (soekarno), sehingga masyarakat tidak lagi dijadikan sekedar objek pembangunan akan tetapi subjek yang turut diberdayakan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

b) Implikasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap pembangunan Nasional

Pembangunan nasional yang sedang dilakukan adalah perekonomiannya atau beratnya pada bidang ekonomi, karena bidang ekonomi sebagai pemicu dan pemacu kemajuan bidang-bidang lainnya. Kendatipun struktur perekonomian Indonesia makin seimbang antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa, namun oleh sementara pengamat melihatnya belum efisien. Adanya kebocoran, korupsi, kolusi, nepotisme, pungutan liar dan lain-lain yang sejenis dianggap menodai perekonomian Indonesia. Praktek monopoli, oligopoli dan sejenis lainnya, etatisme dan persaingan bebas (*free fith libralisme*) harus dihilangkan dalam sistem perekonomian Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan dalarn UUD 1945.

Pada pelita-pelita yang lalu pertumbuhan yang diprioritaskan sementara pemerataan di kebelakangkan. Saat ini sudah waktunya meletakkan pemerataan menjadi prioritas, tanpa mengenyampingkan pertumbuhan. Dengan kata lain, dengan

pemerataan akan mencapai pertumbuhan. Konsep ini mengarah kepada *empowerment* (pemberdayaan masyarakat), dan bukan konglomerasi pada sekelompok kecil anggota masyarakat. Selama ini paradigma yang dominan dalam pembangunan adalah paradigma yang meletakkan peranan negara atau pemerintah pada posisi sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Paradigma ini telah banyak mendapat kecaman dari para ahli dan pengamat pembangunan karena sangat tidak mempercayai kemampuan rakyat dalam pembangunan diri dan masyarakat mereka sendiri. Selain itu, paradigma itu menghambat tumbuhnya kearifan lokal sebagai unsur sentral dalam perencanaan pembangunan masyarakat yang berkesinambungan. Perlunya kearifan lokal dâlam perencanaan pembangunan mulai dirasakan ketika orang melihat semakin banyaknya proyek dan program pembangunan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarákat setempat. Negara dan aparatñya dahulu dianggap dapat menjadi "pendorong" pembangunan. Sebagai alternatifhya diajukan paradigma baru yang dikenal dengan paradigma empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Paradigma ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pembangunan àkan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangünan masyarakatnya. Hal ini dianggap lebih mampu mencapai tujuan pembangunan yaitu menghilangkan kemiskinan. Kegagalan pembangunan di negara-negara sedang berkembang disebabkan oleh model pembangunan yang diterapkan tidak memberikan kesempatan kepada rakyat miskin untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Paradigma pemberdayaan ingin mengubah kondisi ini dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang juga mereka pilih sendiri, serta diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dan pihak lain.

Model *empowerment* menciptakan pula suatu metodologi pengumpulan data yang akan digunakan untuk merencanakan program pembangunan yaitu metodologi *Participation Action Research* (PAR). Model ini sama dengan model *community mana ged development* maka PAR pun mengikutkan rakyat, khususnya rakyat miskin dalam mengumpulkan data, menjelaskan sebab-sebab yang mereka anggap menjadi penyebab keterbelakangan masyarakat dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Dengan kata lain PAR masyarakat adalah rekanan dari peneliti bukan sebagai objek. Model *empowerment* dapat dijumpai dalam dua versi yang berbeda dan perbedaan ini akan mempengaruhi strategi yang akan dipakai dalam pelaksanaan pembangunan. Kedua versi *empowerment* tersebut adalah versi Paulo Freire dan versi yang berasal dari Schumacher. Persamaan antara kedua versi itu terletak pada penekanan akan pentingnya setiap agen pembangunan masyarakat mereka sendiri. Adapun yang membedakan kedua versi tersebut terletak pada analisis dan metodologi yang digunakan oleh masing-masing versi.

Versi Paul Freire berinti pada suatu metodologi yang dia sebut sebagai metodologi *conscientization* yakni suatu proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi dan politik yang ada dalam suatu masyarakat dan menyusun cara untuk menghilangkan kondisi opresif dalam masyarakat. Bagi Paul Freire *empowerment*

bukanlah sekadar hanya memberi kesempatan rakyat menggunakan sumber daya alam dan dana pembangunan saja tetapi lebih dan itu empowerment merupakan upaya untuk mendorong masyarakat dalam mencari cara menciptakan kebebasan dan strukturstniktur yang opresif. Dengan kata lain empowerment berarti partisipasi masyarakat dalam politik. Sedang versi Schumacher tentang empowerment kurang berbau politik, beliau lebih menekankan pada hal-hal yang dikatakan beliau sebagai berikut. Pembangunan ekonomi akan berhasil jika dilaksanakan secara meluas. Gerakan pembangunan yang merakyat dengan menitikberatkan këpada pengendalian, pemanfaatan secara optimal, terencanã dan bersemangat, dengan menempatkan tenaga kerja yang berpotensi dengan tepat. Pemerintah tidak pernah dididik jadi enterpreuner, inovator, tetapi jadi regulator; Schumacher percaya bahwa manusia itu mampu untuk membangun diri mereka sendiri tanpa mengharuskan terlebih dahulu menghilangkan ketimpangan struktural yang ada dalam masyarakat. Schumacher menyatakan bahwa strategi yang paling tepat untuk menolong si miskin adalah memberi kàil pada ikan dengan demikian mereka mandiri.

Seperti sudah disebut di atas dua versi empowerment itu akan menentukan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pendukung dan tiñgkat keberhasilannya. *Empowerment* versi Paul Freire telah dapat diduga akan sulit berhasil apabila empowerment itu dihadapkan pada interest-interest yang kuat dan dominan dalam suatu masyarakat. Para elite lokal pasti akan menentang *empowerment* versi Freire karena keradikalannya. Namun *empowerment* versi Schumacher yang memfokuskan pada pembentukan kelompok mandiri juga tidak akan banyak mempunyai arti tanpa ada dukungan politik. Contohnya, dalam

upaya membantu orang miskin dengan memberi kail, namun apabila kaum miskin itu tidak diberi hak untuk mengail di sungai maka pastilah mereka tidak akan dapat. hidup dengan lebih baik. Andaikan juga diberikan häk untuk mengail, tetapi ikan-ikan yang dikail sudah habis di jaring oleh neiayan besar, tentu tidak ada artinya. Dengan kata lain versi empowerment apa pun yang akan kita pilih dibutuhkan "dosis" politik untuk menjadi obat yang ampuh bagi penyakit kemiskinan. *Empowerment* sebagai suatu strategi pembangunan memiliki unsur transformatif. Apabila unsur mi tidak dapat dikembangkan, maka, empowerment tidak akan mampu menjadikan dirinya sebagai strategi yang ampuh dan hanya tinggal menjadi slogan dalam upaya memberantas kemiskinan. Kita tidak akan mampu memberdayakan petani Indonesia apabila mereka tidak diizinkan niendirikan suatu organisasi baru yang benar-benar dibentuk oleh petani dan untuk petani. Dengan kata lain, model empowerment itu sangat berkait dengan upaya membentuk suatu *civil society* (masyarakat madani).

Kendatipun harus berupaya keras untuk memberdayakan rakyat dalam proses pembangunan, namun upaya tersebut harus dilaksanakan secara rasional dalam artian perlu memahami kendala-kendala yang ada dalam diri kelompok rakyat itu sendiri. Amatlah besar resiko kegagalannya apabila demi memberdayakan rakyat menyerahkan sejumlah dana yang cukup besar kepada kelompok masyarakat yang belum pernah memiliki pengalaman mengelola uang sebesar itu ataupun pengalaman lain yang akan dapat membantu memperkokoh keberdayaan kelompok itu. Para pengamat pembangunan di Amerika Latin merasa sangat khawatir atas keputusan organisasi bantuan pembangunan Amerika untuk menyerahkan dana bantuannya langsung. pada. organisasi "akar

rumput" yang kebanyakan belum mempunyai pengalaman dalam pengelolaan dana yang dikhawatirkan adalah kegagalan organisasi itu melaksanakan tugasnya akan menciptakan amunisi bagi mereka-mereka yang propendekatan pembangunan yang topdown untuk menembak jatuh model pemberdayaan itu (*bottom up*).

Satu masalah penting dalam proses pembangunan di negara yang sedang berkembang adalah adanya asas *"the government can do not wrong".* Asas ini menyebabkan sulitnya tumbuh sikap akomodatif dan bertanggung jawab di kalangan aparat negara. Karena pemenintah tidak dapat bersalah, maka aparatnya pun tidak dapat disalahkan. Pemerintah Indonesia telah mendirikan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggantikan asas the government *can do not wrong* termasuk aparatnya menjadi asas *the government can do wrong*.

Memberdayakan rakyat adalah suatu konsep politis yang berarti menata kembali hubungan antara negara dan rakyat dan antara kaya dan miskin, dan bukan hanya sekadar memberi kail pada rakyat. Meskipun diberi kail rakyat tidak akan dapat banyak berbuat apabila ikan-ikan di sungai telah habis ditangkap nelayan besar itu sangat penting dijaga dan dimantapkan stabilitas keamanan dari aspek kehidupan lainnya. Stabilitas ini merupakan sarat mutlak dalam pembangunan. Tidak ada investor yang mau menanamkan modalnya jika stabilitas di negara ini tergoncang. Begitu pula tidak ada ketenangan bagi rakyat untuk turut berpàrtisipasi dalam pembangunan nasional.

Selain diperlukannya stabilitas keamanan dalam pembangunan nasional, maka yang lebih esensial harus dipadukan atau dimantapkan ialah kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak kita untuk mencapai karsa dalam cita-cita nasional, tujuan

nasional, tujuan Pembangunan Nasional, sasaran pembangunan nasional, dan kepentingan Nasional. Begitu pula di dalam gerak pembangunan nasional yang intensif kita lakukan sekarang adalah masalah keterpaduan yang masih perlu mendapat perhatian, baik itu antara pemerintah masyarakat, antar Pusat Daerah, antar sektor-sektor pembangunan maupun di dalam sektor pembangunan. Hal ini harus diupayakan oleh para elit kepemimpinan nasional pada suprastruktur dan infrastruktur baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan konsep keterpaduan ini (Pendekatan Ketahanan Nasional), praktekkan dalam sikap gerak pembangunan nasional, bukan hanya efisiensi yang dapat peroleh, tetapi juga hasil pembangunan nasional tersebut akan lebih bermanfaat atau lebih meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (kesejahteraan dan keamanan), sehingga mempunyai dampak yang luas dalam meningkatkan ketahanan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia (ideologi politik, ekonomi sosial budaya dan hankam). Maka dengan memperhatikan konsepsi ketahanan nasional dan hakikat nilai-nilai pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan nasional yang ingin kita capai, sangat mungkin melaksanakan pembangunan dengan pendekatan ketahanan nasional. ini berarti ketahanan nasional tidak hanya sebagai "kondisi", tetapi juga sebagai *"metode"* untuk menjelaskan dan meramalkan masalah-masalah pembangunan. Setiap masalah yang ada dalam pembangunan nasional mengakibatkan kondisi tertentu dalam ketahanan nasional. Dengan ketahanan nasional yang terus meningkat di segala aspek kehidupan bangsa, bangsa Indonesia akan tetap *"survive",* betapa pun besarnya badai kehidupan yang datang menghantamnya di era kesejagatan ini. Badai tersebut pasti akan dapat kita atasi

dan pasti berlalu. Untuk dapat mengoperasionalkan pendekatan ketahanan nasional kita perlu mengetahui pendekatan kesisteman, karena ketahanan nasional merupakan suatu sistem. Kriteria suatu sistem dipenuhi oleh ketahanan nasional, yakni adanya komponen-komponen yang saling berinteraksi satu sama lain (astagrata) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni peningkatan kesejahteraan dan keamanan.

Impilkasi pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan nasional adalah:

a. Wawasan nusantara sebagai dokrin, nilai dan pedoman dalam implementasi sistem pemerintahan hendaknya selalu diaktualisasikan dalam pembangunan nasional sesuai dengan dinamika dan peradigma dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat majemuk dengan mengakui kebhineka tunggal ikaan bangsa Indonesia tidak bersifat seragam (*uniform)* tetapi mengedepankan kesatuan (*unity*), untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya memperkuat ketahanan daerah, regional dan nasional dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.
b. Pemerintah dalam setiap agendanya terutama dalam pembangunan nasional agar tetap mendapat dukungan dan legitimasi masyarakat, maka di tuntut untuk membuka komunikasi politik yang intensif, menyaring aspirasi dan tuntutan masyarakat serta memberikan pelayanan yang terbaik.

D. Permasalahan yang Dihadapi

1) Masih rendahnya sumber daya manusia;
2) Masih terbatasnya regulasi khususnya di daerah-daerah yang memberikan peluang terhadap pelibatan peran serta masyarakat;
3) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia;
4) Belum optimalnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.[]

المعهد الإسلامي العصري دار المتقين

PONPES MODERN DAARUL MUTTAQIEN TEMBILAHAN

BAB IV

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Pendahuluan

Perkembangan lingkungan strategis memang tidak bisa dilepaskan dari fenomena globalisasi yang terjadi pada hari ini. Istilah globalisasi semakin populer penggunaannya, tidak hanya di kalangan akademisi, namun juga di kalangan politisi, praktisi ekonomi, dunia hiburan, jurnalis, dan kalangan lainnya. Meski demikian pengertian globalisasi sebenarnya masih menjadi perdebatan. Istilah globalisasi kerap digunakan secara berganti-ganti dengan istilah internasional, inter-teritorial, multinasional, transnasional, dan *world-wide*. Terdapat lima macam fenomena dari konsep dasar globalisasi, yakni globalisasi sebagai sebuah internasionalisasi, globalisasi sebagai sebuah liberalisasi, globalisasi sebagi sebuah universalisasi, globalisasi sebagai westernisasi dan globalisasi sebagai deteritorialisasi. Karena itu luluhnya batas-batas negara seringkali dicirikan dengan adanya perdagangan bebas, persaingan bebas serta masuknya pengaruh budaya barat.

Pengamatan lingkungan strategis yang tepat sangat diperlukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan sehingga kebijaksanaan dan strategi yang dilakukan dapat menghasilkan sesuatu yang efektif dan menguntungkan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Pengamatan yang dilakukan meliputi lingkungan global, regional dan nasional dari sudut astragatra.

B. Perkembangan Lingkungan Global

Berakhirnya perang dingin antara Blok Barat dengan Blok timur ditandai dengan makin dominannya kepentingan ekonomi dan perdagangan. Negara-negara maju dan yang sudah mapan, menguasai sebagian besar modal dan teknologi, sehingga mendapatkan nilai tambah yang besar dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan perdagangan internasional. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang pada umumnya hanya memiliki potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang kualitasnya masih rendah, hanya memperoleh nilai tambah yang relatif kecil, ditambah dengan kekalutan kondisi dalam negeri, berakibat masih sangat bergantung pada modal dan teknologi dari Negara maju. Disamping itu, berbagai tuntutan demokratisasi, HAM, ketentuan-ketentuan perdagangan bebas, dan kelestarian lingkungan, harus dipenuhi oleh Negara berkembang, agar tidak dikenakan sanksi dari dunia internasional.

Untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat agar lebih berdaya, berpartisipasi aktif, serta penuh dengan kreativitas, pemerintah melontarkan komitmen yang berlevel internasional. Komitmen ini telah ditandatangani dalam KTT Millenium PBB pada

tahun 2002 bersama 189 negara lainnya. Komitmen semua negara di dunia untuk memberantas kemiskinan ditegaskan dan dikokohkan kembali dalam ”Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan” yang disepakati oleh para kepala negara atau kepala pemerintahan dari 165 negara yang hadir pada KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, September 2002. Hasil deklarasi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen ”Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan”, yang juga telah ditanda-tangani oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia dengan target memberantas kemiskinan pada tahun 2015.

Dalam deklarasi tersebut negara peserta menerapkan Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Dalam MDGs tersebut, terdapat 8 (delapan) tujuan (goal) yang hendak dicapai sampai tahun 2015 oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, dengan tujuan pertama adalah mengatasi dan/atau memberantas kemiskinan dan kelaparan.[1]

C. Perkembangan Lingkungan Regional

Pada lingkungan strategis regional, tragedi 11 September 2001 yang menimpa AS nyata memberikan pengaruh cukup besar. Asia Tenggara semakin mendapat sorotan dunia internasional lantaran sejumlah peristiwa teror yang terjadi secara bertubi-tubi. Korban dalam jumlah besar dan target serangan yang merupakan simbol-simbol Barat merupakan persamaan dari serentetan teror yang terjadi di Indonesia, negara yang terletak di kawasan Asia

[1] United Nations, 2000, Http/www.google.com, diakses tanggal 10 Agustus 2012, Pukul 21.00 Wib.

Tenggara. Teror memang bukan hal baru di Asia Tenggara, sebab ada beberapa kelompok pemberontak yang kerap menggunakan kekerasan sehingga menyebarkan ketakutan di masyarakat. Dalam rangka menghadapi hal tersebut, ASEAN sebagai organisasi regional negara-negara Asia Tenggara membentuk *ASEAN Socio-Cultural Community* (Komunitas Sosial Budaya ASEAN). Munculnya komunitas sosial budaya ini diharapkan dapat membangun kerjasama yang baik dalam bidang sosial budaya dimana kerukunan hidup antar umat beragama termasuk di dalamnya. Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN memuat 348 rencana aksi yang dimaksudkan sebagai panduan bagi negara anggota ASEAN dalam persiapan menyongsong Komunitas Sosial Budaya ASEAN tahun 2015 melalui, penguatan integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat (*people-centered*), serta memperkokoh kesadaran dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap ASEAN.

Pembentukan Komunitas Sosial Budaya ASEAN ini saling berkait dengan komunitas ASEAN lainnya. Misalnya dalam Komunitas Sosial Budaya yang menjaga kerukunan hidup antar umat beragama memiliki keterkaitan dengan Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*) yang membahas langkah antisipatif bersama dalam mengantisipasi dan menanggulangi bahaya terorisme yang sangat rentan pada konflik antar umat beragama sebagaimana telah dipaparkan pada pengaruh perkembangan lingkungan strategis global sebelumnya di atas. Begitu pula dengan Komunitas Ekonomi ASEAN dimana kerukunan antar umat beragama sangat berpengaruh pada situasi ekonomi karena bila kerukunann antar umat beragama tidak terjadi atau konflik antar umat beragama justru marak maka akan berdampak pada perkembangan ekonomi.

Pada hakekatnya, pembentukan Komunitas ASEAN merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan kerjasama antar negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, namun kini kerjasama regional tersebut pun sudah mulai dikembangkan dengan memperluas sasaran kerjasama dengan negara lain di luar negara Asia Tenggara yang dimaksudkan untuk memaksimalkan proses kerjasama ASEAN melalui transformasi pada bidang kerjasama yang dilakukan guna meningkatkan kemampuan negara-negara ASEAN dalam menghadapi perhelatan globalisasi.

D. Perkembangan Lingkungan Nasional

Perkembangan lingkungan nasional dapat dilihat dari aspek astra gatra, yaitu :

a) Posisi dan lokasi geografi

Kondisi Desa di Indonesia umumnya terletak di daerah perairan/rawa-rawa, perbukitan, pegunungan dan berada di pelosok perbatasan, keterisoliran desa-desa ini yang mempersulit masyarakat untuk berkembang maju, karena itu upaya pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam membuka akses infrastruktur jalan ke desa-desa tertinggal, dengan mengikutsertakan masyarakat di desa, wilayah yang akan dibangun melewati rawa-rawa perbukitan atau pegunungan, karena itu diperlukan keterpaduan dukungan dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut.

b) Keadaan dan kekayaan alam

Desa-desa di Indonesia umumnya memiliki keadaan alam seperti lahan berawa-rawa yang luas dan tidak produktif dan potensi kekayaan alam yang sangat sedikit; upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam yang tersedia disekitar desa guna membangkitkan perekonomian, serta dengan melakukan adopsi inovasi teknologi yang sesuai dengan keadaan alam di desa tersebut. Inovasi teknologi dalam memanfaatkan kekayaan alam di desa baik dengan teknologi tepat guna maupun dengan penguasaan teknologi baru dan modern agar mereka dapat meningkatkan produktivitasnya. Teknologi tepat guna yang sesuai dengan keadaan alam desa tertinggal seperti: listrik tenaga air yang memanfaatkan arus air, kincir angin, pemanfaatan energi matahari, dan lain-lain.

c) Keadaan dan kemampuan penduduk

Keadaan penduduk (SDM) biasanya sedikit (jarang-jarang) dengan letak permukiman yang terpencar-pencar; upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan penduduk sehingga tidak lagi tertinggal, serta mengatur penyebaran penduduk, mengendalikan pertambahan penduduk agar mereka dapat hidup secara berkelompok dengan lebih layak dan mandiri. Pembangunan sekolah-sekolah di desa tertinggal harus menjadi prioritas agar dapat meningkatkan kemampuan penduduk mulai dari masa kanak-kanak melalui pendidikan anak usia

dini, Sekolah Dasar dan seterusnya. Pemberdayaan masyarakat mulai dari penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang sudah berlangsung cukup baik, perlu terus ditingkatkan agar kemandirian masyarakat tertinggal akan menyamai masyarakat desa yang lebih maju.

d) Idiologi

Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara Indonesia adalah landasan Idiil bagi rakyat dalam bernegara yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan makna yang terkandung didalam setiap sila-sila Pancasila; pendekatan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan aktivitas keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, adanya rasa kemanusiaan, kebersamaan, gotong royong sama, semangat kebangsaan, adanya rasa persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara, mendahulukan musyawarah dalam menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dalam masyarakat, dan meningkatkan solidaritas dalam masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar sesama.

e) Politik

Pengetahuan Masyarakat akan kehidupan berpolitik umumnya masih terbatas, karena itu pendekatan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang tujuan berpolitik, dan menjamin hak-hak kehidupan politik setiap warga agar mendapat tempat yang semestinya.

f) Ekonomi

Perekonomian masyarakat umumnya masih sangat rendah, rendahnya pengetahuan dalam mengelola SDA, rendah dalam permodalan, rendah dalam penguasaan IPTEK, karena itu pendekatan yang dilakukan adalah dengan penentuan kebijakan ekonomi, pembinaan ekonomi yang berpihak kepada pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan faktor-faktor SDA, serta meningkatkan kelancaran arus distribusi hasil produksi.

g) Sosial Budaya

Kondisi Sosial-Budaya masyarakat umumnya masih sangat rendah, rata-rata tingkat pendidikan masih rendah dan kesehatan yang masih rentan terhadap berbagai macam penyakit, pendekatan yang dilakukan adalah menyiapkan infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas, menjaga kelestarian budaya, serta menghindari masuknya budaya yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat bangsa dan negara.

h) Pertahanan dan Keamanan

Daya upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata, dan menjadi tanggungjawab semua lapisan masyarakat dan pemerintah, dalam menjalankan kebijakan arah pembangunan untuk mewujudkan ketahanan nasional, dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia, pendekatan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan semangat masyarakat bela negara terhadap ancaman baik yang timbul dari dalam dan maupun ancaman dari luar.

E. Peluang dan Kendala

a) Peluang

1) Walaupun begitu derasnya pengaruh globalisasi dan informasi melanda dunia terutama Indonesia dengan muatan dari negara masju berupa liberalisme, demokratisasi ala barat, faham komunisme, sosialisme namun bangsa Indonesia tetap teguh dan bersepakat bahwa pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah falsafah dan dasar negara yang harus dipertahankan serta di implementasikan dengan norma kedaulatan rakyat.
2) Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia merupakan amanat konstitusi (UUD 1945), yang menegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan di atas adalah melalui kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut meliputi semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan sosial budaya serta pertahanan-keamanan.
3) Pengalaman pahit bangsa Indonesia terpuruk pada krisis yang berkepanjangan mendorong para pelaku ekonomi tidak ingin terpuruk lebih dalam. Tekad dan semangat serta keinginan seluruh masyarakat bangsa keluar dari krisis memberikan suasana baru

saling kontrol, saling menjaga untuk tidak melakukan langkah yang keliru dalam pembangunan nasional.

4) Dibukanya koridor politik, ekonomi hukum sebagai bagian dari reformasi dan telah menjadi kesepakatan serta niat yang harus dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia memberikan angin segar harapan masyarakat dalam berperan serta membangun bangsa yang lebih demokratis.

5) Kuatnya komitmen kebangsaan yang diwujudkan dalam bentuk persatuan dan kesatuan bangsa dengan perekat satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa menjadi perekat kuat identitas bangsa Indonesia untuk tetap menjaga dan dilestarikan dibawah lambang "*bhineka tunggal ika*"

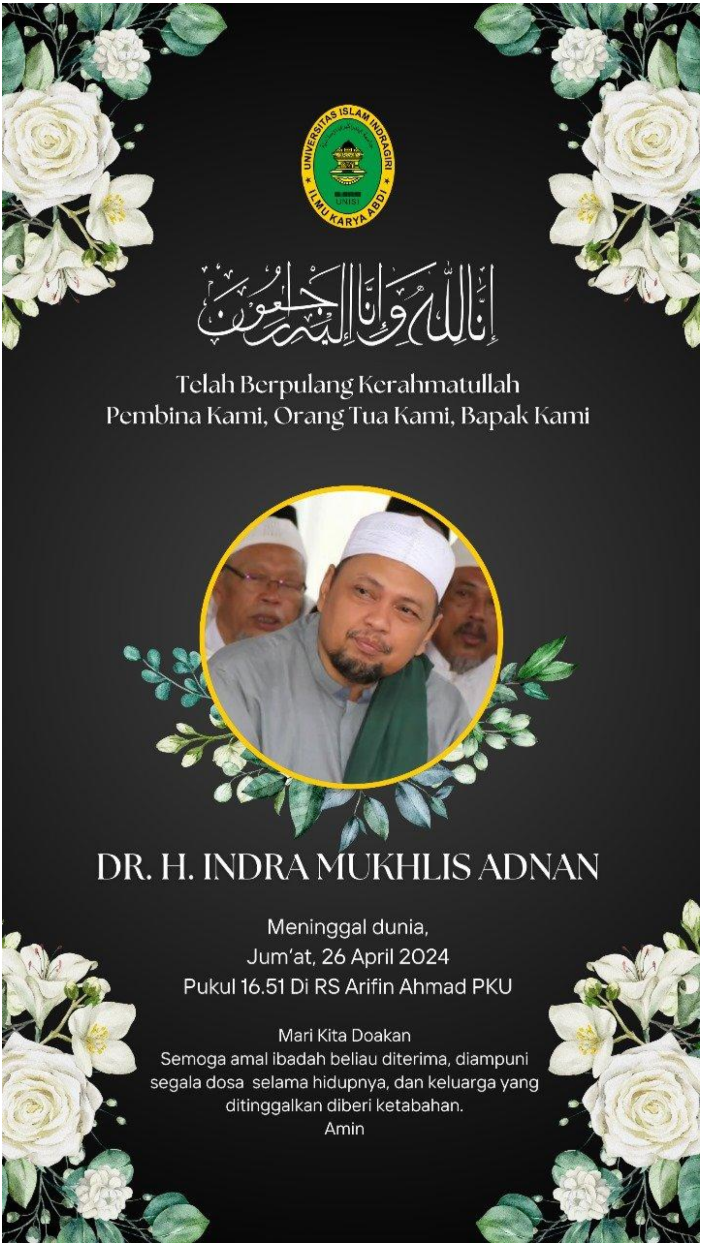
b. Kendala

1) Derasnya arus globalisasi dan informasi dengan membawa muatan dari negara sponsor membawa nilai-nilai baru yang mungkin bertentangan bahkan menginfiltasi nilai-nilai yang ada dimasyarakat yang tidak sejalan dengan falsafah pancasila. Maksudnya nilai-nilai baru bahkan cendrung menimbulkan konflik dengan nilai-nilai yang sudah ada.

2) Ekses reformasi politik yang begitu cepat bergulir ditangkap oleh sebagian masyarakat sebagai perwujudan demokrasi memunculkan persaingan partai politik yang ditandai dengan menjamurnya partai baru dengan aspirasi yang berbeda pula.

Gelombang ini akan membawa dampak tarik menarik antara kepentingan nasional dengan kepentingan golongan, kelompok dan individu.

3) Ketidakseimbangan dalam kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dalam proses pembangunan. Dengan proses pembangunan yang terus berlanjut, justru ketidakseimbangan itu dapat makin membesar yang mengakibatkan makin melebarnya jurang kesenjangan.
4) Masih berkembangnya budaya praktek KKN dalam sistem kehidupan masyarakat walaupun intensitasnya menurun membawa dampak kebocoran keuangan negara.
5) Belum pulihnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai akibat trauma lama menjadi apathis dalam berperan serta.[]


UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
UNISI
ILMU KARYA ABDI
إنا لله وإنا إليه راجعون
Telah Berpulang Kerahmatullah
Pembina Kami, Orang Tua Kami, Bapak Kami
DR. H. INDRA MUKHLIS ADNAN
Meninggal dunia,
Jum'at, 26 April 2024
Pukul 16.51 Di RS Arifin Ahmad PKU
Mari Kita Doakan
Semoga amal ibadah beliau diterima, diampuni
segala dosa selama hidupnya, dan keluarga yang
ditinggalkan diberi ketabahan.
Amin

BAB V

Perberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Komunikasi Politik dalam Rangka Pembangunan Nasional

A. Pendahuluan

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mewujudkan *raison de'etre* pemerintahan yaitu mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahannya (*legitimasi*), pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan jaman. Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, *pertama :* perlu aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu *sensitive* terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. *Kedua :* pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam

melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat *Community development* sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinegri. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Selain dengan amanat yang diemban dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan

yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

B. Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat Yang Diharapkan

Konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakanan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ;

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan

kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini

adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. Friedman (1992) menyatakan "*The empowerment approach, which is fundamental to an altenative development, places the emphasis an autonomy in the decesion marking of territorially organized communities, local self-reliance (but not autachy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning*"[1]

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena Kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

---

[1] John Friedman, 1992, *Empowerment: The Politics of Alternative Development.* Cambridge: Blackwell,

Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut ; ***Pertama***, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. ***Kedua***, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendakdan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. ***Ketiga***, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konsukensi dari pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah pada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development)*. Guna mengimplementasikan program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yakni *1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, 2. Peningkatan regulasi khususnya di daerah-daerah guna memberikan peluang terhadap pelibatan peran serta masyarakat, 3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia, 4. Mengoptimalkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.*

a) Meningkatkan Sumber Daya Manusia

1) Membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik;
2) Meningkatkan akses, pemerataan, dan relevansi pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas serta meningkatkan pendidikan luar sekolah;
3) Peningkatan pembangunan infrastruktur kesehatan serta penempatan tenaga kesehatan yang lebih merata;

4) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dengan peningkatan ketersediaan tenaga medis dan paramedis, terutama pada pelayanan kesehatan dasar;
5) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia berbasis potensi dan kearifan lokal dengan memasyarakatkan wawasan dan jiwa kewirausahaan;
6) Memberdayakan lembaga adat dan kearifan lokal serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep dan kebijakan pembangunan nasional.

b) Peningkatan regulasi khususnya di daerah-daerah guna memberikan peluang terhadap pelibatan peran serta masyarakat

1) Mendorong regulasi yang tegas terhadap pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat.
2) Meningkatkan regulasi yang tegas memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam proses penyusunan peraturan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3) Meningkatkan kualitas produk hukum dan perundangan-undangan daerah serta sosialisasi kepada masyarakat baik produk hukum daerah maupun hukum nasional.
4) Menjunjung tinggi penegakan dan pelaksanaan tindakan hukum secara adil dan merata.

c) **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia**

1) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan agribisnis dan kelautan yang berwawasan lingkungan.
2) Peningkatan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
3) Percepatan pengentasan kemiskinan dengan membuka akses pada daerah kantong produksi yang masih terisolir serta menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dan memperluas lapangan kerja.
4) Pengembangan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan mereka.
5) Pemberdayaan ekonomi rakyat dengan kepastian modal dan kepastian pasar.
6) Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat serta meningkatkan akses masyarakat miskin pada pelayanan dasar.
7) Pemerataan pembangunan yang berkeadilan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

d) Mengoptimalkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta pemberdayaan masyarakat

1) Meningkatkan reformasi kelembagaan dengan meningkatkan keterlibatan dan kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar pembangunan nasional menjadi efisien dan terkendali.
2) Meningkatkan keserasian hubungan antar daerah dan antara Pusat dan Daerah, termasuk keserasian kebijakan dalam dan antar daerah, serta antara kebijakan nasional dan daerah terutama dalam pemerataan pembangunan.
3) Meningkatkan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.
4) Meningkatkan Pemberdayaan dan keterbukaan dalam setiap agenda pembangunan nasional, akan lebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara riil dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat.
5) Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera;

C. Kontribusi Pemberdayaan Masyarakat Guna Meningkatkan Komunikasi Politik Dalam Rangka Pembangunan Nasional

a) Kontribusi guna meningkatkan komunikasi politik

Berdasarkan asumsi bahwa demokrasi ibarat suatu pola dengan titik gravitasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sebagai berikut : a) *tahap inisial* : dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat; b) *tahap partisipatoris* : dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat; dan c) *tahap emansipatif* : dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa kita sudah mencapai tahap kedua, dengan mengecualikan beberapa wilayah yang mungkin sudah memasuki tahap ketiga. Tantangan di masa depan menuntut terjadinya proses akselerasi gerak untuk memasuki tahap emansipatif : dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dalam kerangka ini, pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan langkah yang amat penting bagi gerak akselerasi tahap ketiga dalam pembangunan nasional.

Dalam konsep pembangunan, pendekatan partisipasi dimaknai; pertama, sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan dalam mempromosikan proses-proses demokratisasi dan pemberdayaan[2]. Kedua, pendekatan ini juga dikenal sebagai partisipasi dalam dikotomi instrumen *(means)* dan tujuan (*ends*). Konsep ketiga, partisipasi adalah *elite capture* yang dimaknai sebagai sebuah situasi dimana pejabat lokal, tokoh masyarakat, LSM, birokrasi dan aktor-aktor lain yang terlibat langsung dengan program-program partisipatif, melakukan praktik-praktik yang jauh dari prinsip partisipasi. Dalam argumen effisiensi, Cleaver mengatakan bahwa partisipasi adalah

---

[2] Frances Cleaver, dalam Bill Cooke dan Uma Kothari, 2002, *Participation: the New Tyranny*. Zed Books, London. Hal. 36.

sebuah instrumen atau alat untuk mencapai hasil dan dampak program/kebijakan yang lebih baik, sedangkan dalam argumen demokratisasi dan pemberdayaan, partisipasi adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas individu-individu, sehingga menghasilkan sebuah perubahan yang positif bagi kehidupan mereka[3].

Perbedaan cara pandang atas partisipasi dalam konteks pembangunan nasional akan memberikan implikasi yang berbeda dalam melakukan analisis terhadap hubungan kekuasaan dalam sebuah proses yang partisipatif dan cara bagaimana komunitas sasaran mendapatkan manfaat dari proses pembangunan. Dalam perspektif instrumental, hubungan antara masyarakat sebagai sasaran program dan pengambil kebijakan atau lembaga pemberi bantuan relatif tidak terjadi. Dengan kata lain tidak ada interaksi antara kedua pihak, sehingga desain program dan kebijakan pembangunan yang dibuat lebih banyak atau bahkan sepenuhnya berada di tangan para elite (*community leader*). Sementara masyarakat penerima manfaat hanyalah terlibat seputar implementasi program bahkan hanya sebagai tukang. Sebaliknya, pendekatan tujuan memandang hubungan kekuasaan dalam sebuah proses yang partisipatif mengarah pada upaya-upaya perubahan dan pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri, sehingga harus ada kesamaan hubungan kekuasaan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program/ kebijakan pembangunan. Masyarakat sasaran harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung, sehingga mereka tahu apa yang diputuskan dan manfaat yang akan diambil pada saat program diimplementasikan dan selesai dijalankan[4].

---

[3] *Ibid,* Hal. 37

[4] Trevor Parfitt, 2004, *'The Ambiguity of Participation: a Qualified Defence of Participatory Development'*, Third World Quarterly. Hal. 539.

Sejalan dengan pendapat tersebut, lebih lanjut Laode M. Kalamuddin[5], mengemukakan bahwa selama ini bangsa Indonesia telah salah dalam memandang atau dalam mempersepsikan pembangunan selama ini, yaitu karena pembangunan hanya dilihat sebagai *output*, sebagai hasil-hasil yang nyata dari jerih payah dan usaha yang dijalankan oleh manusia baik secara pribadi, kelompok maupun masyarakat. Melihat hasil-hasil pembangunan dengan kacamata fisikal tersebut, misalnya dengan melihat kenyataan bahwa hasil-hasil pembangunan fisik selama 10 tahun terakhir, telah menyebabkan mengabaikan *(over looking)* akan arti, arah dan tujuan pembangunan itu sendiri. Pola yang ditawarkan dalam membangun perspektif dan orientasi yang baru adalah dengan memfokuskan kepada pembangunan sosial. Sosial dalam pengertian ini lebih dimaksudkan sebagai perspektif global atau holistik yang memfokuskan penekanannya kepada keseluruhan masyarakat manusia *(civil society)*, dimana aspek pembangunan fisik dan ekonomi hanya merupakan salah satu aspek pengamatan terhadap realitas sosial itu sendiri. Tujuan-tujuan strategis seperti ini, akan selalu dapat dikoreksi pada setiap tahap kemajuan atau proses pembangunan atau perubahan sosial yang direncanakan secara terus menerus. Sehingga pembangunan dengan demikian merupakan upaya yang sadar dan terus menerus, dalam perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Joseph Stiglitz[6] menyatakan bahwa partisipasi warga negara tidak saja dalam hal ikut serta dalam pemilu, namun juga berperan serta dalam pengambilankeputusan kepada masalah-masalah yang menjadi hajat hidup orang banyak. Gavenda dan

---

5 Laode M. Kalamuddin, 2000, *Format Indonesia Baru Paradigma Pembangunan Menuju Millenium III*, Pustaka Sinar Harapan.

6 Joseph Stiglitz, 2002, *Globalization and its discontents,*Penguin Books, England.

Valderrama mencatat adanya pergeseran perkembangan dan makna partisipasi. Secara tradisional, pada periode 60-an dan 70-an, partisipasidalam pembangunan dipahami sebagai partisipasi di tingkat proyek dan mikro, ditujukan kepada penerima manfaat (*beneficiaries*) lebih kepada modus konsultasi dan berlangsung pada tataran penaksiran (*appraisal*). Sementara, makna partisipasi yang sedang berkembang adalah partisipasi pada tingkat kebijakan dan makro, ditujukan kepada warga Negara (*citizen*) dan melalui modus pengambilan keputusan (bukan konsultasi) dan bergerak pada tataran implementasi.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, salah satu kunci utama dari keseluruhan upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminasi permasalahan tersebut adalah bagaimana memperkuat kemampuan masyarakat lapisan bawah, yang masih berada dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, keterbelakangan, dan membutuhkan pertolongan agar lebih berdaya dalam kemandirian, keswadayaan, partisipasi dan demokratisasi.

Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Di samping itu, juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. Masyarakat yang perlu diberdayakan antara lain kaum buruh, petani, nelayan, orang miskin di kota dan di desa, kelompok masyarakat dalam kondisi yang marginal, dan dalam posisi lemah,

serta pinggiran. Pemberdayaan rakyat merupakan proses yang tidak dapat dilakukan secara *partial*, tetapi membutuhkan strategi pendekatan yang menyeluruh. Pemberdayaan bukan hanya meliputi individu dan kelompok masyarakat lapisan bawah *(grassroots)*, pinggiran *(peripheris)*, dan pedesaan *(rural communities)* sebagai kelompok sasaran, tetapi juga meliputi *NGOs* sebagai pelaku dan kelompok organisasi juga perlu diberdayakan. Selain masyarakat sebagai kelompok sasarannya, NGOs pun perlu mempertahankan kemandirian dan keswadayaannya, serta diberi kebebasan untuk berkembang, agar memiliki kekuatan sendiri tanpa perlu dibina dan dikontrol oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan konsep Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat[7].

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Sehingga dengan konsep pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menjadi jembatan meningkatnya komunikasi politik dalam pembangunan

---

[7] Agnes Sunartiningsih, 2004, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Aditya Media, Yogyakarta, Hal. 21.

nasional antara masyarakat dengan pemerintah dalam setiap agenda pembangunan baik dalam skala nasional maupun lokal, karena hasil dari pembangunan itu masyarakat sendiri yang akan merasakannya.

b) Kontribusi Guna Meningkatkan Komunikasi Politik Dalam Rangka Pembangunan Nasional

Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat (*people empowering*) terutama dipedesaan. Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam arti pertama sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan; kedua sebagai program dan ketiga sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan, tetapi bagaimanapun dalam membuat kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan publik sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakat. Jika tidak, suatu gejolak sosial akan terjadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Banyak contoh produk kebijakan yang sangat kontra di masyarakat sebagai akibat pemerintah senantiasa tidak membuka diri untuk melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan. Pemberdayaan partisipasi masyarakat sipil atau '*civil society*' merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan pada

masa-masa mendatang, keterlibatan ini akan memberikan dampak yang positif terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil atau yang akan di implementasikan, karena dapat membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Tony Bovaird dan Elke Loffler[8], mengilustrasikan bahwa partisipasi rakyat dalam membuat kebijakan digambarkan dengan 'tangga partisipasi' dalam hal ini rakyat di posisikan sebagai anak tangga terbawah yang senantiasa mengetahui masalah sosial yang sesungguhnya. Tanpa memberdayakan dan konsultasi di anak tangga terbawah, maka pemerintah tidak akan pernah tahu apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh rakyat. Apabila komunikasi di tingkat bawah telah diperkuat maka akan terjadi dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah akan lebih efektif dan efisien dalam membuat kebijakan.

Menyimak ilustrasi dari Tony Bovaird dan Elke Loffler maupun Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perncanaaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, sebenarnya proses pembuatan kebijakan pembangunan bersifat elitis, artinya pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila model ini diadopsi dalam upaya iplementasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka yang diperlukan adalah keterbukaan pemerintah untuk menjadikan masukan masyarakat sebagai dasar dalam menyusun kebijakan publik. Selama ini permasalahan yang ditemukan adalah bukan karena kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat rendah tetapi justru terletak pada praktek-praktek pemerintah yang mengabaikan usulan masyarakat.

[8] Tony Bovaird & Elke Loffler, 2004, "*Public Management and Governance*".

Berkaitan dengan ini Mahmuddin Muslim[9] mengutip hasil *survey Public Integity Index* menemukan bahwa permasalahan bukan pada rendahnya kualitas dan kuantitas tingkat partisipasi masyarakat, tetapi terletak pada ketertutupan mekanisme politik bagi keterlibatan warga negara dalam menuntut akuntabilitas dan keterbukaan. Hambatan utama dalam mengupayakan pemerintah yang terbuka dan akuntabel justru terletak pada institusi-institusi (peraturan perundangan) yang cenderung memiliki kepentingan sendiri yang berbeda dengan kepentingan publik dan praktek pemerintahan yang tidak peka terhadap desakan kepentingan publik. Kondisi ini dapat mendorong praktek terjadinya korupsi dalam sebuah mekanisme yang saling melindungi dan sampai saat ini tidak dapat disentuh oleh tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas.

Melalui Musrenbang, apa yang diilustrasikan oleh Tony Bovaird dan Elke Loffler ini sebenarnya sudah dilaksanakan di Indonesia, namun dalam pelaksanaan dilapangan banyak dihadapi berbagai permasalahan. Selain permasalahan yang berasal dari instirusi dan praktek-praktek pemerintah, pemasalahan yang dihadapi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam kebijakan pembangunan adalah: pertama, lemahnya sumber daya manusia, kedua, lemahnya perangkat hukum yang memberikan ruang terhadap partisipasi publik walaupun ada perangkat hukum tetapi tidak mengatur secara eksplisit bagaimana, dimana dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan public, ketiga, lemahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dan keempat, masih belum optimalnya komitmen pemerintah dalam mendorong

[9] Mahmuddin Muslim, 2006, *Menanti APBD berbasis Partisipasi Masyarakat, Makalah Disampaikan pada Training APBD*, Bukittinggi, Departemen Keuangan RI.

pemerataan pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala partisipasi agar pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dalam pembangunan nasional adalah dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Menurut Ginanjar Kartasasmita[10], menyebutkan bahwa studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya partisipasi (politik) masyarakat, bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menetang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal: 1). Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi estrem dirasakan merugikan. 2). Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut. 3). Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut. 4). Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan. Sehingga pergeseran kebijakan program pembangunan yang komprehensif perlu keterlibatan politik masyarakat secara efektif dan dukungan berbagai sektor terpadu termasuk dukungan infrastruktur ekonomi yang tangguh memihak kepada kepentingan masyarakat sangat diperlukan guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional.

---

[10] Ginanjar Kartasasmita,*Op.,Cit*

D. Indikator Keberhasilan

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia;
2) Peningkatan regulasi khususnya di daerah-daerah guna memberikan peluang terhadap pelibatan peran serta masyarakat;
3) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia;
4) Mengoptimalkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta pemberdayaan masyarakat.[]

BAB VI

Konsepsi Pemecahan masalah

A. Pendahuluan

Hidupnya demokrasi dalam suatu negara bangsa, dicerminkan oleh adanya pengakuan dan penghormatan negara atas hak dan kewajiban warga negara, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional sebagai wujud rasa tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Dalam pada itu, aparatur pemerintah dalam mengemban tugas pembangunan, tidak harus berupaya melakukan sendiri, tetapi mengarahkan ("*steering rather than rowing*"), atau memilih kombinasi yang optimal antara *steering* dan *rowing* apabila langkah tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan sosial yang maksimal. Yang jelas sesuatu yang sudah bisa dilakukan oleh masyarakat, jangan dilakukan oleh pemerintah. Apabila masyarakat atau sebagian dari mereka belum mampu atau tidak berdaya, maka harus dimampukan atau diberdayakan (*empowered*). Pemberdayaan berarti pula memberi

peran kepada masyarakat lapisan bawah di dalam keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan pembangunan.[1]

Dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam memikul tanggung jawab pembangunan, peran pemerintah dapat ditingkatkan antara lain melalui (a) pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat, (b) perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan (c) pengembangan program untuk lebih mening-katkan keamampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan mereka.[2]

B. Kebijakan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan kebijakan sebagai berikut **"Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Guna Meningkatkan Komunikasi Politik Dalam Rangka Pembangunan Nasional".** Kebijakan tersebut selanjutnya menjadi arah dan pedoman dalam merumuskan berbagai strategi dan upaya.

C. Strategi

Mengacu pada kebijakan tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan strategi pokok, sebagai berikut :

---

[1] Mustopadidjaja AR. 1999, *"Format Bernegara Menuju Masyarakat Madani"; dalam Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, LAN. hal 10-16.

[2] *Ibid.*

a) ***Strategi I : Meningkatkan Sumber Daya Manusia.***

Strategi ini di fokuskan bagaimana meningkatkan kualitas SDM di Indonesia yang masih menjadi permasalahan yang cukup serius dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada di bawah rata-rata IPM negara-negara asia lainnya. SDM merupakan faktor utama dalam pembangunan. Negara-negara yang memiliki pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta tingkat kesejahteraan yang lebih baik biasanya adalah negara-negara yang memiliki SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas SDM merupakan salah satu faktor penentu bagi kemampuan suatu negara atau daerah untuk menjadi negara atau daerah yang memiliki daya saing tinggi. Jepang dan sejumlah negara lainnya merupakan negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, namun negara-negara tersebut memiliki SDM yang berkualitas sehingga mereka mampu menjadi negara yang maju. Kualitas SDM yang bagus menjadikan negara maju mampu menjadi negara yang lebih kompetitif (*competitive state*) apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui

cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka.

b) ***Strategi II : Peningkatan regulasi khususnya di daerah-daerah guna memberikan peluang terhadap pelibatan peran serta masyarakat.***

Strategi ini di fokuskan terhadap peningkatkan regulasi khususnya terkait pelibatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan nasional, mengutip hasil survey Public Integity Index menemukan bahwa permasalahan pembangunan nasional bukan pada rendahnya kualitas dan kuantitas tingkat partisipasi masyarakat, tetapi terletak pada ketertutupan mekanisme politik bagi keterlibatan warga negara dalam menuntut akuntabilitas dan keterbukaan. Hambatan utama dalam mengupayakan pemerintah yang terbuka dan akuntabel justru terletak pada institusi- institusi (peraturan perundangan) yang cenderung memiliki kepentingan sendiri yang berbeda dengan kepentingan publik dan praktek pemerintahan yang tidak peka terhadap desakan kepentingan publik. Kondisi ini dapat mendorong praktek terjadinya korupsi dalam sebuah mekanisme yang saling melindungi dan sampai saat ini tidak dapat disentuh oleh tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas.

c) ***Strategi III : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia.***

Strategi ini di fokuskan pada bagaimana meningkatkan kesejateraan masyarakat Indonesia, hal ini sangat

penting dalam konsep pemberdayaan masyarakat dimana Kemiskinan dan pengangguran merupakan isu yang sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup sehari-hari. Kedua isu tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pengangguran merupakan salah satu penyulut bagi lahirnya dan merebaknya angka kemiskinan. Oleh karena itu, pengangguran merupakan rintangan terbesar bagi upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga menjadi salah satu pendorong lahirnya pengangguran. Kemiskinan merupakan penghalang seseorang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan turut andil dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan nasional.

d) ***Strategi IV : Mengoptimalkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.***

Strategi ini di fokuskan bagaimana mengoptimalkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dengan konsep pelibatan peran serta masyarakat, hal ini sangat penting mengingat kondisi kebutuhan pembangunan di Indonesia sangat berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, sehingga perlu kepekaan pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat guna tercapainya tujuan pembangunan nasional itu sendiri.

D. Upaya

Agar strategi pokok yang telah ditetapkan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

a) **Upaya I : Meningkatkan Sumber Daya Manusia**

<u>Metode : Edukasi</u>

1) Pemerintah maupun pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak akademisi maupun LSM memberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap program pembangunan nasional;
2) Pemerintah bekerjasama dengan akademisi. LSM memberikan pendidikan politik yang bertujuan terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan melalui partisipasi politik dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi dari pembangunan itu sendiri;
3) Pemerintah bekerjasama dengan elemen terkait memberikan pendidikan dan pelatihan melalui strategi pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan manusia (*capacity building*).

b) **Upaya II : Peningkatan regulasi khususnya di daerah-daerah guna memberikan peluang terhadap pelibatan peran serta masyarakat.**

<u>Metode : Regulasi</u>

1) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong melalui regulasi yang tegas terhadap pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat;
2) Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM dan DPR mengeluarkan instrument hukum yang secara subtantif mengatur pelibatan masyarakat dan elemen masyarakat mana yang dilibatkan dalam proses pembangunan nasional itu sendiri,sehingga mekanisme pelibatan masyarakat menjadi jelas;
3) Pemerintah maupun pemerintah daerah melalui regulasi yang tegas memfasilitas guna mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat.

c) **Upaya III : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia**

<u>Metode : Deseminasi dan Kebijakan</u>

1) Pemerintah bekerjasama dengan elemen terkait mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan pola pengembangan kemitraan.
2) Pemerintahmendorongpengembanganprogramuntuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif

dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

3) Pemerintah melalui kebijakan yang tegas mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat dengan kepastian modal dan kepastian pasar.

4) Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tegas guan menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat serta meningkatkan akses masyarakat miskin pada pelayanan dasar.

5) Pemerintah melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

d) Upaya IV : Mengoptimalkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta pemberdayaan masyarakat.

<u>Metode : Kebijakan dan Regulasi</u>

1) Pemerintah bersama DPR mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang tegas guna meningkatkan reformasi kelembagaan dengan meningkatkan keterlibatan dan kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar pembangunan nasional menjadi efisien dan terkendali.

2) Pemerintah bersama DPR membuat regulasi yang tegas dalam rangka meningkatkan keserasian hubungan antar daerah dan antara Pusat dan Daerah, termasuk keserasian kebijakan dalam dan antar daerah, serta antara kebijakan nasional dan daerah terutama dalam pemerataan pembangunan.
3) Pemerintah membuat kebijakan yang tegas guna meningkatkan Pemberdayaan dan keterbukaan dalam setiap agenda pembangunan nasional, yang akan lebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara riil dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat.
4) Pemerintah bersama DPR membuat kebijakan dan regulasi guna mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera.[]



BAB VII

Penutup

A. Kesimpulan

1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan saat ini. Pengabaian terhadap faktor ini, terbukti telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemborosan keuangan negara merupakan implikasi lain deviasi tersebut. Proses pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi proyek-proyek pembangunan di tingkat kabupaten/kota, terbukti telah berhasil membawa perubahan-perubahan mendasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2) Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya

pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Sehingga dengan konsep pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menjadi jembatan meningkatnya komunikasi politik dalam pembangunan nasional antara masyarakat dengan pemerintah dalam setiap agenda pembangunan baik dalam skala nasional maupun lokal, karena hasil dari pembangunan itu masyarakat sendiri yang akan merasakannya.

3) Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan, tetapi bagaimanapun dalam membuat kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan publik sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakat. Jika tidak, suatu gejolak sosial akan terjadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Banyak contoh produk kebijakan yang sangat kontra di masyarakat sebagai akibat pemerintah senantiasa tidak membuka diri untuk melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan. Pemberdayaan partisipasi masyarakat sipil atau '*civil society*' merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional pada masa-masa mendatang, keterlibatan ini akan memberikan dampak yang positif terhadap keputusan dan

kebijakan yang diambil atau yang akan di implementasikan, karena dapat membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

B. Saran

1) Disarankan kepada pemerintah hendaknya dalam setiap agenda penyusunan rencana pembangunan nasional hendaknya memperhatikan partisipasi masyarakat hal ini dikarenakan Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka.
2) Disarankan kepada pemerintah hendaknya menjadikan konsep pemberdayaan masyarakat menjadi jembatan/ sarana guna meningkatnya komunikasi politik dalam pembangunan nasional antara masyarakat dengan pemerintah dalam setiap agenda pembangunan baik dalam skala nasional maupun lokal.
3) Pemberdayaan partisipasi masyarakat sipil atau '*civil society*' merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional pada masa-masa mendatang sehingga diharapkan pemerintah mampu memberikan instrument hukum dan regulasi yang tegas terkait dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam agenda pembangunan nasional.

LPTNU

LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI

Nahdlatul Ulama

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Astrid S. Susanto, *Komunikasi Sosial di Indonesia*, Jakarta, 1989.

Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1995.

Agnes Sunartiningsih, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Aditya Media, Yogyakarta, 2004.

Donald Brown, *"Poverty-Growth Dichotomy".* Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment.* New York: New York University Press. 1995.

Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa,* Erlangga, Jakarta, 1994.

E. Suharto, *Metodologi Pengembangan Masyarakat.* Community work in New Zealand, 2002.

Everett M. Rogers, *Communication in Organization,* New York: The Free Press. 1976.

Fred Wibowo, *Komunikasi Media Teater Rakyat*, Paper Workshop Komunikasi Teater Rakyat, Studio Audio Visual-Universitas Sanata Darma, Yogyakarta.

Frances Cleaver, dalam Bill Cooke dan Uma Kothari, *Participation: the New Tyranny*. Zed Books, London. 2002.

Jhon Clark, "*The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector.*" World Development. 1995.

Jhon Friedman, *Empowerment The Politics of Alternative Development.* Blackwell Publishers, Cambridge, USA, 1992.

Joseph Stiglitz, *Globalization and its discontents,*Penguin Books, England, 2002.

INFID, *Pembangunan di Indonesia: memandang dari sisi lain*, Yayasan Obor, Jakarta. 1993.

L.Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Laode M. Kalamuddin, *Format Indonesia Baru Paradigma Pembangunan Menuju Millenium III*, Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan.* Yayasan Obor Indonesia, 2001.

M.Tampobulon, *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan. Sumatera Utara. 2006.

Manfred Oepen, (ed) Media Rakyat*, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat* (P3M), Media Rakyat, Jakarta, 1988.

Mustopadidjaja AR, *"Format Bernegara Menuju Masyarakat Madani"; dalam Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, LAN,1999.

Onny S.Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi,* CSIS, Jakarta, 1996.

Pokja Lemhannas RI. 2007. *BS Geostrategi dan Tannas: Modul 3 Konsepsi dan Tolok Ukur Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.

R.Chambers, *Rural Development : Putting The Last First*, London; New York: Longman,1995

Riswandha Imawan, *Menciptakan Birokrasi yang Responsif untuk Pembangunan Martabat Manusia*, Gadjah Mada Press Yogyakarta, 1990.

S. Kumar, *Methods for Commmunity Participation*, ITDP Publishing, London. 2002.

Sardjono MA, *Mosaik Sosiologi Kehutanan: masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*. Jogyakarta: Debut press. 2004.

Selo Soemardjan dan Soemardi Soelaiman, *Setangkai Bunga Sosiologi.* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974.

Tri Winarni, *Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21, Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Fisipol UGM, Aditya Media, Yogyakarta, 1998.

Trevor Parfitt, *'The Ambiguity of Participation: a Qualified Defence of Participatory Development'*, Third World Quarterly, 2004.

Tony Bovaird & Elke Loffler, "*Public Management and Governance*". 2004.

Windhu, I. Marsana, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

Zulkarimein Nasution, *Komunikasi Pembangunan,* Erlangga, Jakarta, 1988.

B. Artikel/Makalah/Distertasi/Tesis/Skripsi

A. Mahmudi, *Metode Penelitian Kritis dan Prinsip-prinsip Participatory Action Research* (PAR). Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi Agama Islam Swara Ditpertais: No. 19 Th. II, 15 November 2004.

Budi Suwarna dan *M. Yunus, Bankir Kaum Papa*, Artikel Kompas tanggal 14 Oktober 2006.

Mahmuddin Muslim, 2006, *Menanti APBD berbasis Partisipasi Masyarakat, Makalah Disampaikan pada Training APBD*, Bukittinggi, Departemen Keuangan RI.

Saharia, *Pemberdayaan Masayarakat Di Pedesaan Sebagai Salah Satu Upaya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Manusia Secara Optimal.* Makalah Individu Pengantar Falsafah Sains (PPS702). Sekolah Pascasarjana / S3 Institut Pertanian Bogor, 2003.

Tirta Hidayat, *"Model-model Perencanaan Pembangunan Nasional Masa Depan*", dalam Prisma Nomor Khusus 25 Tahun Prisma 1971-1996.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen ke 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian Kedelapan “Hak turut serta dalam Pemerintahan

Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

D. Internet

Agus Purbathin Hadi, *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan,* Http//www.google. *suniscome.50webs.com/.*

Anonim. 2002. *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Website. Perkumpulan Masyarakat Penanggulangan Bencana.http:// pmpbencana.org.

Agusta, I. 2005, *Aneka Metode Partisipasi Untuk Pembangunan Desa.* Blogspot http://iagusta.blogspot.com/. Sosiolog Pedesaan Institut Pertanian Bogor.

Asep Saepul Mualim, *Meningkatkan Ketahanan Nasional Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi.* http// *moegrafis.blogspot. com/2011/.../meningkatkan-ketahanan-nasional-dalam-menghadapi-Era-Globalisasi.*

Dayal. R. Christine van Wijk, and Nilanjana Mukherjee. 2000, *Methodology for Participatory Assessments with Communities, Institutions and Policy Makers.* Website. http://www.waspola. org/default/policy/web.

Dani Umar, *Makna Pembangunan Nasional*, Http//www. blogspot.20, diakses tanggal 20 Mei 2012, Pukul 21.00 Wib.

Felix Iwan Wijayanto, *Komunikasi dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*, Http// *kalimasada.blogdetik.com/.../komunikasi-partisipatif-dalam-proses-Pemberdayaan Masyarakat.*

Ginandjar Kartasasmita, 1997, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Makalah ini diangkat dari bahan kuliah pada Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung (ITB), yaitu mata kuliah *Pembangunan yang Bertumpu Pada Masyarakat* (SP 607), www.ginanjar.com, diakses tanggal 10 Juni 2012, Pukul 21.00 Wib.

Mohamad Ikbal Bahua, Metode Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Masyarakat, Http//www.google.com, diakses tanggal 27 Juli 2012.

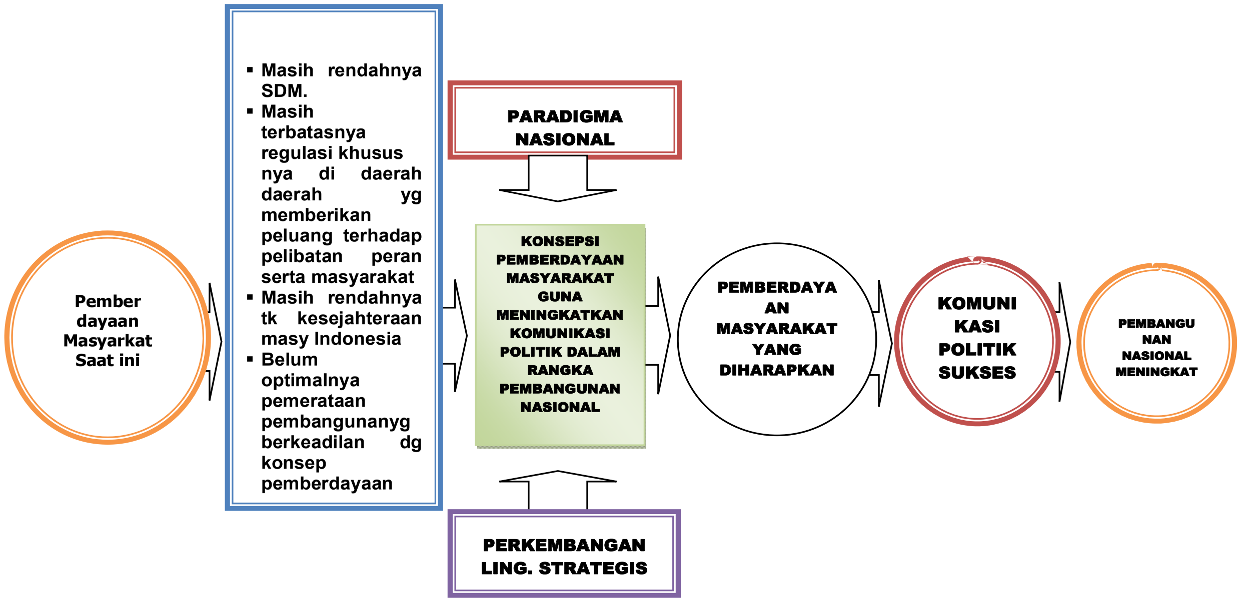
M.Thoyib, *Model pembelajaran partisipatif.* Website. Departemen Sosial RI. 2007, http://www.mirror.depsos.go.id/.

United Nations, 2000, Http/www.google.com

LAMPIRAN

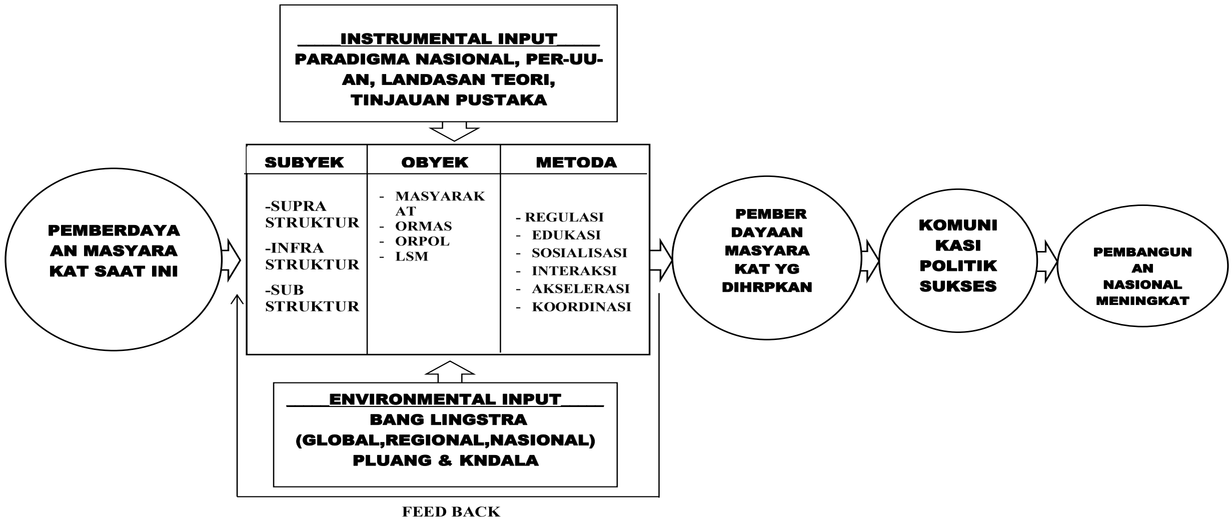
ALUR PIKIR

PEMBERDAYAA MASYARAKAT GUNA MENINGKATKAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL



POLA PIKIR

PEMBERDAYAA MASYARAKAT GUNA MENINGKATKAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

جامعة إيندراكيري الإسلامية

UNISI

ILMU KARYA ABDI



Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D. Lahir di Teluk Pinang, Gaung Anak Serka, Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 29 Desember 1966. Meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) dan Magister Hukum (S-2) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, memperoleh gelar Magister Manajemen (S-2) dari Sekolah Tinggi Manajemen "IMMI" Jakarta, sedangkan gelar Doktor (S-3) diperoleh dari Universitas Utara Malaysia, Kedah Kuala Lumpur.

Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan. Di samping itu, Penulis juga mengajar di beberapa Universitas di Jakarta dan Riau, serta menjadi Pembicara di berbagai Seminar dan Pelatihan yang diadakan oleh para pengusaha, akademisi, birokrat, pemuda, mahasiswa dan para santri.

Beberapa aktivitas organisasi yang telah digeluti, antara lain: KNPI, AMPI Partai Golkar, Masyarakat Perhutanan Indonesia Reformasi, GAPENSI, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, KADINDA Riau, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan APKASI/BKKKS, PSSI, Dalam bidang Politik, penulis pernah menjadi Anggota DPRD Riau periode 1999-2003 dan pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hilir selama dua (2) periode berturut-turut, yaitu periode 2003-2008 dan 2008-2013. Setelah purna tugas dari jabatan sebagai Bupati, saat ini penulis mengabdikan diri dan *concern* terhadap pengembangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis yakin, melalui pendidikan tinggi dan berkualitas akan mengantarkan generasi bangsa menuju kesuksesan yang gemilang. Pendidikan yang didirikan, Universitas Islam Indragiri Tembilahan, Akademi Kebidanan "Husada Gemilang" Tembilahan, Ponpes Modern "Syech Walid Thaib Saleh Indragiri" Teluk Sungka, Indragiri Hilir, Ponpes Modern "Daarul Muttaqien" Tembilahan, Indragiri Hilir.

TRUSSMEDIA GRAFIKA
Jl. Gunungan, Karang RT. 03, No. 18
Singosaren, Banguntapan, Bantul, DIY
Phone. 08 222 923 8689/ WA. 0857 291 888 25
Email: one_trussmedia@yahoo.com

ISBN 978-602-0992-50-1
9 786020 992501